

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SKRIPSI

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh

NURUL SHOLEHA

E12111102

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nurul Sholeha

E12111102

Telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi

Pada tanggal 16 Oktober 2015

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Pembimbing I



Prof. H. A. Gau Kadir, MA
NIP. 195010171980031001

Pembimbing II



Dr. Hj. Nurlinah, M.Si
NIP. 196309211987022001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Politik dan
Pemerintahan



Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si
NIP. 196412311989031027

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Nurlinah, M.Si
NIP. 196309211987022001

LEMBARAN PENERIMAAN

Skripsi

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Yang dipersiapkan dan disusun oleh
Nurul Sholeha
E12111102

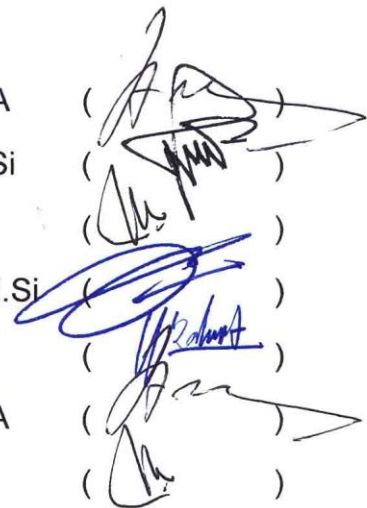
Telah diperbaiki
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
Pada program studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Pada hari Jumat, tanggal 16 oktober 2015

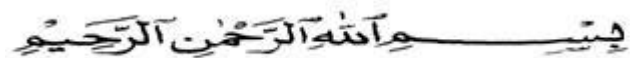
Menyetujui ,

PANITIA UJIAN

Ketua	: Prof.Dr.H.A. Gau Kadir, MA
Sekretaris	: A. Lukman Irwan, S.Ip, M.Si
Anggota	: Dr.Hj. Nurlinah, M.Si
Anggota	: Dr.H. Andi Samsu Alam, M.Si
Anggota	: Rahmatullah, S.Ip, M.Si
Pembimbing I	: Prof.Dr.H.A. Gau Kadir, MA
Pembimbing II	: Dr.Hj. Nurlinah, M.Si



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, ridho, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar*”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Prodi Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang singkat. Selama penyusunan skripsi ini, penulis menemukan berbagai hambatan-hambatan dan tantangan, namun hambatan-hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi berkat tekad yang kuat, segala upaya dan usaha yang keras serta tentunya dukungan tenaga, pikiran dan doa dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, Ayah Jaenuddin dan Ibu Rahmah Daeng, yang telah memberikan segala dukungannya yang luar biasa kepada penulis. Baik itu berupa kasih

sayang, dukungan moral dan materi serta doa yang tak pernah ada hentinya selalu diberikan dengan ikhlas kepada penulis, semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kesehatan serta resekai kepada kedua orang tua penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan pada program S1 Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Andi Alimuddin M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya
3. Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si, selaku ketua jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan beserta seluruh staf pegawai di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku ketua prodi ilmu pemerintahan fakultas ilmu social dan ilmu politik Universitas Hasanuddin dan selaku pembimbing II penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr.H.A. Gau Kadir, MA selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.
6. Para tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membagi ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kabupaten Kepulauan Selayar.
9. Terima kasih untuk saudara-saudara seperjuangan Enlightenment, Iping, Adit, Andis, Padul, Unci, Hendry, Adi, Fauzi, Awwing, Gusti, Hugo, Rijal, Ullah, Same, Hilal, Dodo, Irul, Heri, Uki, Gilang, Momoy, Amril, Arman, Ade, Ono, Dewy, Gadis, Nila, Unya, Wana, Wulan, Tenri, Anti, Ati, Tenri, Eka, Atum, Novben, Uni, Endi, Cece, Delfa, Eki, Upi, Novi, dan Indri. Terima kasih atas tangis, canda tawa, dan cerita yang telah kalian berikan selama ini. Kalian telah menjadi salah satu catatan sejarah hidup bagi Penulis. Penulis beruntung telah dipertemukan dengan Kalian. Otonomi 2011, TETES DARAH MILITAN !!!
10. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) FISIP Unhas, Respublika 2006, Renaissance

2007, Glasnost 2008, Aufklarung 2009, Volksgeist 2010, Enlightenment 2011, Fraternity 2012, Lebensraum 2013, Fidelitas 2014. Salam Merdeka Militan !

11. Terima kasih kepada teman-teman KKN Gel. 87 Kabupaten Bone, Kecamatan Tellu Siattinge, Desa Tajong, yakni Fuad, sem, Aldi, Vebri, Tari dan Twelvi, terima kasih telah menjadi keluarga sekaligus saudara yang meyenangkan walaupun dalam waktu yang singkat.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya serta panjatkan doa yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-Nya, atas segala izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan strata 1 di Universitas Hasanuddin tercinta.

Semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diterima disisi-Nya dan diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya. *Amin YaRabbal 'Alamin.*

Makassar, 13 November 2015

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
INTISARI	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kebijakan Pembangunan Pariwisata.....	7
2.2Prinsip-prinsip Pembangunan Pariwisata.....	21
2.3Jenis dan Macam Pariwisata	27
2.4Kerangka Konseptual	30
2.4.1 Skema Kerangka Konseptual	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Lokasi Penelitian.....	33
3.2Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data	33

3.3	Informan Penelitian	35
3.4	Defenisi Operasional	35
3.5	Analisis Data.....	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Selayar	36
4.1.1	Sejarah Kabupaten Kepulauan Selayar.....	37
4.1.2	Letak Geografis.....	41
4.1.3	Batas Wilayah	41
4.1.4	Luas Wilayah	41
4.1.5	Jumlah Kecamatan,Desa dan Kelurahan	42
4.1.6	Kondisi Sosial dan Budaya.....	43
4.1.6.1	Ketenagakerjaan	43
4.1.6.2	Agama.....	43
4.1.7	Sarana dan Prasarana Umum.....	43
4.1.7.1	Pendidikan	43
4.1.7.2	Transportasi	44
4.2	Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar	46
4.3	Visi Dan Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar	50
4.3.1	Visi.....	50
4.3.2	Misi	51
4.3.3	Tujuan dan sasaran	52

	4.3.3.1 Tujuan	53
	4.3.3.2 Sasaran.....	55
4.4	Strategi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	62
4.5	Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar	65
4.6	Gambaran Umum Objek Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar	66
	4.6.1 Wisata Budaya	68
	4.6.1.1 Sejarah Gong Nekara	68
	4.6.1.2 Struktur Gong Nekara	70
	4.6.2 Wisata Alam (Gua Tajuiya)	72
	4.6.3 Wisata Bahari (Pantai Pabaddilang)	73
	4.6.4 Pengunjung	75
4.7	Pendapatan Asli Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar	77
4.8	Kebijakan Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar	77
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	85
	5.1 Kesimpulan.....	85
	5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA		
DOKUMENTASI		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

BAB IV	Halaman
Tabel 4.1	42
Tabel 4.2	50
Tabel 4.3	51
Tabel 4.4	76

INTISARI

Nurul Sholeha, “Analisis Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar” (Dibimbing oleh Gau Kadir dan Nurlinah)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan potensi pariwisata dan kebijakan pembangunan pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap responden yang berasal dari instansi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), anggota DPR komisi C bagian Pembangunan, pengelola tempat wisata. Informan dipilih secara sengaja dengan memperhatikan keterlibatan mereka dalam proses pengembangan pembangunan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Potensi Obyek wisata (bahari, budaya dan alam) di Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu ditingkatkan karena Obyek wisata yang dikelola langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya obyek wisata bahari “Pantai Pabaddilang” yang bekerjasama dengan masyarakat sekitar dalam pemungutan retribusinya, Obyek wisata alam “Gua Tajuiya” hanya dijadikan masyarakat sekitar sebagai tempat mengambil air bersih karena di dalam gua tersebut terdapat mata air dan wisata budaya “Gong Nekara” yang mengelola adalah masyarakat sekitar obyek wisata yang dibawah langsung oleh cagar budaya makassar.. Adapun Kebijakan Pembangunan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar belum menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memiliki Visi Misi khusus tentang pembangunan pariwisata sehingga dalam pembangunan pariwisata belum menjadi prioritas utamanya.. Meskipun demikian pemerintah daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan selalu mengembangkan dan melakukan promosi dalam rangka meningkatkan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kata kunci : kebijakan. Pembangunan dan pariwisata

ABSTRACT

Nurul Sholeha, "The analysis of the development tourism in the archipelago district selayar" (Supervised by Gau Kadir and. Nurlinah)

This study aims to know and analyzing the development of the tourism potential and policy of development tourism archipelago district selayar islands South Sulawesi province.

Data collected by using interview techniques, study of documents, and observation. The Interviews carried out of the respondents derived from the local government agencies archipelago district selayar official culture and tourism, member of the DPR, the manager of the tourist attractions. chosen informant intentionally with regard to their involvement in the development process of tourism development in archipelago district selayar.

The results showed that the current potential of tourist places (maritime, cultural and natural) in the archipelago district selayar islands, still need to be developed but because of limitations until now no one has been able to menegelola some sights that are considered necessary to be developed. Until now a tourist attraction that is managed directly by the Department of Culture and Tourism only nautical tourism "beach Pabaddilang" in cooperation with local communities in the collection of retribution, Natural attractions "Cave Tajuiya" only serve the local community as a place to take water because in the cave There are springs and cultural tourism "Nekara Gong" is the local community that manages the tourist attraction supervised directly by the cultural heritage of Makassar. Going forward selayar islands regency tourism agencies will follow this aside for the development of human resources as well as to the development of tourism. As for the tourism development policy in selayar islands regency has not been a top priority. Selayar islands regency local governments currently do not have a specific vision and mission of tourism development so that the current tourism development has not been a main priority. Because to carry out the construction required a clear budget as a reference to be included in the design for the construction RPJMD so clear and focused estimate. so that the implementation of the policy of Regional Regulation No. 11 Year 2011 on Tourism Development Master Plan, all of them can be said to be valid to the fullest. Nevertheless particular local government of Culture and Tourism will always develop and promote tourism in order meningkatakn selayar islands regency.

Keywords: policy, development and tourism

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kebijakan dan pembangunan adalah dua konsep yang terkait. Kebijakan menunjuk pada kerangka kerja pembangunan, memberikan pedoman bagi pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan ke dalam beragam program dan proyek, sedangkan pembangunan adalah dimana konteks kebijakan beroperasi. Sebagai suatu perubahan terencana dan berkesinambungan, pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam merumuskan program/kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat yang ikut serta bersama-sama melaksanakan program/kebijakan yang telah diputuskan, yang didukung oleh sarana dan prasarana yang ada.

Pelaksanaan kebijakan pembangunan sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Selayar No. 12 tahun 2002 maka peranan pemerintah sebagai fasilitator sangat strategis dalam mewujudkan upaya-upaya ke arah pengembangan pariwisata tersebut melalui kepemimpinan institusinya bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu; perencanaan (planning) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (development)

fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (policy) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (regulation).

Maka daripada itu pariwisata daerah perlu mendapat perhatian lebih mendalam khususnya aset-aset wisata yang memiliki potensi wisata yang bukan saja bernilai historis melainkan aset wisata yang berpotensi ekonomis. Dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja, maka industri pariwisata dijadikan salah satu sektor andalan dimana pariwisata dianggap sebagai salah satu industri yang menimbulkan efek ganda bagi sektor lainnya.

Peluang usaha yang tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Selayar, sektor pariwisata merupakan salah satu produk unggulan komoditas yang sangat potensial untuk dikembangkan. Setidaknya ada 3 (tiga) jenis obyek wisata yang memiliki daya tarik bagi untuk berkunjung ke daerah ini, yaitu: (a) wisata alam; (b) wisata bahari ; dan (c) wisata budaya. Namun demikian, dari tiga jenis obyek wisata yang menjadi daya tarik utama tersebut, terdapat sejumlah masalah yang cukup berat dalam pengembangannya, terutama keterbatasan infrastruktur dan suprastruktur pariwisata termasuk alat transportasi baik darat, laut maupun udara.

Dari beberapa peluang pembangunan sektor pariwisata, ada beberapa tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar yang sangat perlu untuk di kembangkan seperti wisata bahari, wisata alam dan wisata budayanya. Melalui pelaksanaan serangkaian kebijaksanaan

selama ini telah ditingkat pembinaan dan pengembangan kepariwisataan seperti meningkatkan promosi pariwisata, menyiapkan dan meningkatkan mutu pelayanan dan mutu produk-produk wisata, mengembangkan kawasan-kawasan pariwisata. Akan tetapi upaya tersebut ternyata belum mampu meningkatkan kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun dari mancanegara untuk berkunjung ke tempat objek wisata di Kabupaten Selayar.

Upaya yang telah dilakukan tersebut, masih terdapat beberapa masalah dan tantangan yang harus dihadapi aparat pemerintah yaitu (1) Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan pusat dengan daerah tujuan wisata, sehingga arus wisatawan relatif rendah. (2) Terbatasnya fasilitas pelayanan akomodasi dan telekomunikasi di daerah tujuan wisata. (3) Kurangnya kegiatan promosi wisata keluar daerah dan manca negara. (4) Terbatasnya usaha-usaha jasa pariwisata seperti penginapan, rumah makan, restoran. (5) Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam program pengembangan objek wisata.

Wakil bupati selayar **H. Saiful Arif S** mengatakan “potensi sumber daya pariwisata daratan selayar telah terdata sekitar 15 obyek daya tarik wisata andalan, meliputi 11 daya tarik wisata alam, 2 daya tarik wisata sejarah, dan 2 daya tarik wisata budaya. Yang saat ini sedang dalam tahap pengembangannya secara bertahap dan berskala prioritas . pengembangan obyek wisata daya tarik tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar nantinya siap dikunjungi oleh wisatawan. Dikatakannya kata

siap disini bermakna bahwa obyek daya tarik wisata yang dikembangkan melalui penyiapan saran dan prasarana pendukung oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka pengembangan objek wisata yang dapat meningkatkan PAD bagi Kabupaten Selayar merupakan tantangan besar dalam proses pemnbangunan pariwisata di daerah.

Dari data diatas dengan demikian, pemerintah dalam hal ini sebagai salah satu pihak yang memiliki kewajiban untuk meningkatkan pembangunan di daerahnya masing-masing seharusnya mampu melakukan hal-hal konkrit. Seperti halnya mengeluarkan kebijakan yang mengena langsung untuk mengatasi maslah pembangunan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan adalah sebuah kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan pariwisata sehingga obyek-obyek wisata yang ada dapat dikembangkan oleh pemerintah dengan lebih baik dengan strategi-strategi dan tindakan-tindakan, atau rencana-rencana untuk mengatasi masalah pembangunan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan keadaan yang tergambar diatas, penulis menganggap penting hal tersebut penting untuk diteliti agar dapat diketahui pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan

pariwisata di kabupaten kepulauan selayar serta hal yang berpengaruh terhadap kebijakan tersebut. Masalah tersebut membuat peneliti tertarik untuk membahas dan mengkajinya dengan judul “**Analisis Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Selayar.**”

2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di muka, dan untuk memberikan batasan ruang lingkup pembahasan dalam kajian tentang kebijakan pembangunan pariwisata , maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Bagaimana potensi objek wisata (bahari, budaya dan alam) di kabupaten kepulauan selayar?
2. Bagaimana kebijakan pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar ?

3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan menggambarkan data tentang:

1. Potensi obyek wisata (bahari,alam dan budaya) di Kabupten Kepulauan Selayar.
2. Kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yng diharapkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian Ilmu Pemerintahan.
2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi bagi lembaga pemerintahan daerah dalam proses pelaksanaan kebijakan pembangunan pariwisata di kabupaten kepulauan selayar.
3. Manfaat Metodologis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji kebijakan pembangunan pariwisata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kebijakan pembangunan,

2.1 Kebijakan Pembangunan Pariwisata

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata kebijakan berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. Kebijakan juga dapat berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewitt (1973), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan

berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan negara harus meliputi semua " tindakan "pemerintah sehingga bukan semata - mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Sementara ada para ahli yang menitik beratkan kebijakan sebagai suatu serangkaian keputusan atau tindakan.

Parker mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tujuan tertentu atau serangkaian asas tertentu atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada waktu tertentu dalam kaitan dengan subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang kritis.

Selanjutnya akan dijelaskan Berbagai definisi tentang kebijakan kepariwisataan dikemukakan oleh ahli-ahli pariwisata. Goeldner dan Ritchie (2006) mendefinisikan kebijakan pariwisata sebagai regulasi, aturan, pedoman, arah, dan sasaran pembangunan/promosi serta strategi yang memberikan kerangka dalam pengambilan keputusan individu maupun kolektif yang secara langsung mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan sekaligus kegiatan sehari-hari yang berlangsung di suatu destinasi.

Biederman (2007) menambahkan hal penting dalam definisi kebijakan kepariwisataan dengan mengemukakan bahwa prinsip dari kebijakan kepariwisataan adalah harus menjamin negara maupun daerah mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kontribusi sosial dan ekonomi yang diberikan pariwisata. Biederman juga menyebutkan bahwa sasaran akhir dari kebijakan pariwisata adalah peningkatan kemajuan negara atau daerah dan kehidupan warga negaranya.

“A tourism policy defines the direction or course of action that a particular country, region, locality or an individual destination plans to take when developing or promoting tourism. The key principle for any tourism policy is that it should ensure that the nation (region or locality) would benefit to the maximum extent possible from the economic and social contributions of tourism. The ultimate objective of a tourism policy is to improve the progress of the nation (region or locality) and the lives of its citizens”.

Definisi yang lebih luas dikemukakan oleh Edgell, dkk (2008) yang mengemukakan bahwa kebijakan pariwisata merupakan kerangka etis yang terfokus pada isu-isu yang dihadapi dan mempertemukan secara efektif keinginan/kebutuhan masyarakat dengan rencana, pembangunan, produk, pelayanan, pemasaran, serta tujuan dan sasaran keberlanjutan bagi pertumbuhan pariwisata di masa yang akan datang, seperti yang dinyatakan berikut ini.

“Tourism policy is a progressive course of actions, guidelines, directives, principles, and procedures set in an ethical framework that is issues-focused and best represents the intent of a community (or nation) to effectively meet its planning, development, product, service, marketing, and sustainability goals and objectives for the future growth of tourism”.

Definisi terakhir menjadikan pemasaran, pengembangan produk, dan pelayanan hospitality memegang peranan penting dalam kebijakan kepariwisataan. Lebih penting lagi, definisi tersebut mengisyaratkan bahwa kebijakan kepariwisataan bersifat dinamis dan fleksible dalam melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap perkembangan yang terjadi.

Kebijakan kepariwisataan terkait erat dengan perencanaan kepariwisataan. Menurut Edgell, dkk. (2008) perencanaan kepariwisataan memperkuat kedudukan kebijakan kepariwisataan dalam pembangunan. Edgell, dkk (2008) mengemukakan bahwa model perencanaan pariwisata mencakup pernyataan visi dan misi yang diikuti oleh serangkaian tujuan, sasaran, strategi, dan taktik dalam pengembangan pariwisata.

Kebijakan dan perencanaan kepariwisataan seharusnya dapat berfungsi secara efektif sebagai arah pembangunan kepariwisataan suatu destinasi. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak sekali konflik kepentingan di tingkat para pengambil keputusan pada saat mengimplementasikan kebijakan maupun perencanaan kepariwisataan yang sebenarnya sudah disepakati bersama sehingga perkembangan pariwisata tidak lagi mengacu pada kebijakan dan perencanaan yang sudah dibuat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pembangunan berarti proses, cara, perbuatan membangun, dari atas proses

pembangunan yang dimulai dari negara maju melalui pemerintah negara berkembang, diturunkan kepada rakyat.

Pembangunan mempunyai pengertian yang sangat luas, secara sederhana pembangunan itu adalah perubahan kearah yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Pembangunan dapat diartikan juga sebagai gagasan untuk mewujudkan sesuatu yang dicitacitakan. Dimana gagasan tersebut lahir dalam bentuk usaha untuk mengarahkan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, serta pembangunan bangsa.

Seperti yang telah diuraikan diatas, pembangunan merupakan perubahan menuju kearah perbaikan. Perubahan ke arah perbaikan itu sendiri memerlukan pengerahan segala budi daya manusia untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Dengan sendirinya pembangunan merupakan proses penalaran dalam rangka menciptakan kebudayaan dan peradaban manusia.

Pembangunan tidak dapat berhenti atau dihentikan karena manusia hidup selalu dipenuhi oleh suasana perubahan. Inti pembangunan bukan hanya terjadinya perubahan struktur fisik atau material, tetapi juga menyangkut perubahan sikap masyarakat. Pembangunan harus mampu membawa umat manusia melampaui pengutamaan aspek-aspek materi dari kehidupannya sehari-hari. Di samping itu pembangunan adalah upaya memajukan atau memperbaiki serta meningkatkan nilai sesuatu yang sudah ada.

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses dinamis yang senantiasa berkembang terus dalam menjawab tuntutan kebutuhan serta kondisi perkembangan zaman. Pembangunan kepariwisataan Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah, tantangan dan hambatan baik yang berskala global maupun nasional. Selain itu diperlukan pula perubahan paradigma dalam memandang pariwisata dalam konteks pembangunan nasional. Pariwisata tidak lagi semata dipandang sebagai alat peningkatan pendapatan nasional, namun memiliki spektrum yang lebih luas dan mendasar. Oleh karenanya pembangunan kepariwisataan Indonesia memerlukan fokus yang lebih tajam serta mampu memposisikan destinasi pariwisatanya sesuai potensi alam, budaya dan masyarakat yang terdapat di masing-masing daerah.

Dalam konteks ini, setiap daerah harus dapat memposisikan dirinya dalam kerangka pembangunan kepariwisataan nasional dengan diimbangi dengan perencanaan yang matang dan upaya-upaya peningkatan kompetensi SDM yang berkualitas dunia. Pada lampiran disajikan pula berbagai indikator ekonomi perkembangan kepariwisataan Indonesia yang dapat dipergunakan dalam mengembangkan keparkepariwisataan di berbagai daerah khususnya dalam konteks pengembangan wisata bahari.

Istilah pariwisata berasal dari Bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu *pari* dan *wisata*. *Pari* berarti berulang-ulang atau berkali-kali, sedangkan *wisata* berarti perjalanan atau bepergian. Jadi

pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang (H.Oka A. Yoeti :1996:112). .

Pengertian pariwisata secara umum merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Di dalam mencoba menganalisa mengenai kepariwisataan, maka akan muncul beberapa gambaran dalam benak kita, sebab kepariwisataan dapat dipandang sebagai suatu yang abstrak, misalnya gejala yang melukiskan kepergian orang-orang di dalam negerinya sendiri atau keluar negeri. Proses bepergian ini mengakibatkan terjadinya interaksi, hubungan saling pengertian, perasaan, persepsi, motivasi. Tekanan-tekanan kepuasan, kenikmatan dan lain-lain di antara sesama pribadi atau antara kelompok.

Pada dasarnya gejala pariwisata terdiri dari tiga unsur yaitu : manusia (unsur insani sebagai pelaku kegiatan pariwisata), tempat (unsur fisik yang tercakup dalam kegiatan itu sendiri) dan waktu (unsur tempo yang digunakan dalam perjalanan dan selama berdiam di tempat tujuan). Tetapi hendaknya pariwisata tidak disamakan dengan kegiatan jalan-jalan “ cuci mata” atau “makan angin” pada suatu saat tertentu.

Segi lain pariwisata hendaknya dipandang sebagai suatu industri yang turut memberi andil dalam kehidupan sosial dan ekonomi, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Menurut Saleh Wahab, dalam bukunya Manajemen Kepariwisatan bahwa:

“Pariwisata adalah salah satu industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, peningkatan taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan. Lagi pula pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks meliputi industri-industri lain dalam arti yang klasik, seperti industri kerajinan tangan, dan industri cenderamata (souvenir), penginapan dan transportasi.

Untuk lebih jelasnya penulis mengangkat beberapa pengertian mengenai pariwisata yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Diantaranya adalah Nyoman S Pendit dalam bukunya ilmu pariwisata sebuah pengantar perdana, mengemukakan bahwa :

“ Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bergerakanya manusia dan benda, yang membawa dinamika kehidupan”.

Sedangkan menurut Saleh wahab, pariwisata adalah :

“Suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang di dalam suatu negara itu sendiri (di luar negeri), meliputi penndiaman orang-orang dari suatu daerah lain (daerah tertentu, suatu negara atau benua) untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang di dalamnya diamana ia pernah pekerjaan tetap.”

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa setiap perjalanan untuk pariwisata adalah peralihan tempat untuk sementara waktu, dan mereka mengadakan perjalanan tersebut

memperoleh pelayan dari lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang kepariwisataan. Oleh karena itu, dari definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat 4 faktor yang penting dalam pariwisata, faktor-faktor penting tersebut adalah :

1. Perjalanan dilakukan untuk sementara waktu
2. Perjalanan dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain
3. Perjalanan itu harus dikaitkan dengan pertamasyaan atau rekreasi, dan
4. Orang yang melakukan perjalanan wisata tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjungi dan semata-mata sebagai konsumen di tempat tersebut.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka penulis dapat memberikan pengertian pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari satu tempat ke tempat lain yang mempunyai obyek dan daya tarik wisata untuk dapat dinikmati sebagai suatu rekreasi atau hiburan yang mendapatkan kepuasan lahir dan batin. Sedangkan yang disebut wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap ditempat yang didatanginya, atau hanya untuk sementara waktu tinggal ditempat yang didatanginya.

Potensi Pariwisata adalah kemampuan, kesanggupan, kekuatan dan daya untuk mengembangkan segala sesuatu yang berhubungan

dengan perjalanan, pelancongan, atau kegiatan pariwisata lainnya dalam hal ini pengembangan produk objek dan daya tarik wisata.

Kepariwisataan mengandung potensi untuk dikembangkan menjadi atraksi wisata. Maka untuk menemukan potensi kepariwisataan di suatu daerah, orang harus berpedoman kepada apa yang dicari oleh wisatawan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 disebutkan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Potensi kepariwisataan merupakan suatu hal yang mempunyai kekuatan dan nilai tambah tersendiri untuk dikembangkan menjadi suatu atraksi wisata. Potensi pariwisata dapat dibagi tiga menurut Yoeti (1982), yaitu :

1. Potensi Alam

Potensi alam adalah keadaan dan jenis flora dan fauna suatu daerah, bentang alam suatu daerah, misalnya pantai, hutan, dan lain-lain (keadaan fisik suatu daerah). Kelebihan dan keunikan yang dimiliki oleh alam jika dikembangkan dengan memperhatikan keadaan

lingkungan sekitarnya niscaya akan menarik wisatawan untuk berkunjung ke objek tersebut.

2. Potensi Kebudayaan

Potensi budaya adalah semua hasil cipta, rasa dan karsa manusia baik berupa adat istiadat, kerajinan tangan, kesenian, peninggalan bersejarah nenek moyang berupa bangunan, monument.

3. Potensi Manusia

Manusia juga memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai daya tarik wisata, lewat pementasan tarian/pertunjukan dan pementasan seni budaya suatu daerah.

Adapun Tentang Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan Pasal 1 mengatakan bahwa :

“Daya tarik wisata adalah sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan”.

Unsur yang terkandung dalam pengertian di atas dapat disimpulkan, yaitu: (1) setiap daya tarik wisata memiliki keunikan, keindahan; (2) daya tarik dapat berupa alam, budaya, atau hasil karya manusia yang berseni tinggi dan layak untuk dijadikan suatu produk; (3) yang menjadi sasaran utama adalah wisatawan.

Pengertian objek dan daya tarik wisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata yang menjadi sasaran perjalanan wisata meliputi :

“Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna, seperti: pemandangan alam, panorama indah, hutan rimba dengan tumbuhan hutan tropis, serta binatang-binatang langka. Karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro (pertanian), wisata tirta (air), wisata petualangan, taman rekreasi, dan tempat hiburan. Sasaran wisata minat khusus, seperti: berburu, mendaki gunung, gua, industri dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat ziarah, dan lain-lain”.

Pasal 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menjelaskan pula pengertian kepariwisataan adalah :

“Keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, dan pengusaha”.

Pengertian di atas, dengan demikian dapat dijelaskan pada Pasal 4 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, bertujuan untuk :

- a. “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;

- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa”.

Konsep pengertian pariwisata diatas memang sudah cukup untuk menentukan atau menilai apakah suatu daerah dapat dikatakan sebagai Daerah Tujuan Wisata, Tetapi objek wisata tersebut sebaiknya memiliki kriteria-kriteria yang memenuhi syarat serta berpotensi sehingga layak untuk dijual.

Yoeti (1982 : 164), mengatakan bahwa ada tiga kriteria yang menentukan suatu objek wisata dapat diminati wisatawan, yakni:

“Pertama, *Something To See* adalah objek wisata tersebut harus mempunyai sesuatu yang biasa dilihat atau dijadikan tontonan oleh pengunjung wisata. Dengan kata lain objek tersebut harus mempunyai daya tarik khusus yang mampu untuk menyedot minat dari wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Kedua, *Something To Do* adalah agar wisatawan bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk memberikan perasaan senang, bahagia, relax, berupa fasilitas rekreasi baik arena bermain atau tempat makan, terutama makanan khas dari tempat tersebut sehingga mampu membuat wisatawan lebih betah tinggal di sana. Ketiga, *Something To Buy* adalah fasilitas untuk wisatawan berbelanja yang pada umumnya adalah ciri khas atau ikon dari daerah tersebut, sehingga bisa dijadikan sebagai ole-ole”.

Objek wisata dapat dijadikan sebagai salah satu objek wisata yang menarik, maka faktor yang sangat menunjang adalah kelengkapan dari sarana dan prasarana objek wisata tersebut. Karena sarana dan prasarana juga sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan objek wisata.

Yoeti (1982 : 181), mengatakan bahwa :

“Prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang, sehingga dapat memberikan pelayanan untuk memuaskan kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam.

Prasarana tersebut antara lain:

1. Perhubungan: jalan raya, rel kereta api, pelabuhan udara dan laut, terminal.
2. Instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih.
3. Sistem telekomunikasi, baik itu telepon, telegraf, radio, televisi, kantor pos, dan lain-lain.
4. Pelayanan kesehatan, baik puskesmas atau rumah sakit.
5. Pelayanan keamanan, baik pos satpam penjaga objek wisata maupun pos-pos polisi untuk menjaga keamanan di sekitar objek wisata.
6. Pelayanan wisatawan, baik berupa pusat informasi atau kantor pemandu wisata.
7. Pom bensin.
8. Dan lain-lain”.

Objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu Daerah Tujuan Wisata. Objek dan daya tarik wisata merupakan salah satu unsur dalam produk pariwisata yang harus mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak guna menunjang perkembangan kepariwisataan. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dikelompokkan ke dalam :

- a. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam
- b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya
- c. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus

Daya tarik wisata harus dirancang dan dibangun secara profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang. Membangun suatu objek wisata harus dirancang sedemikian rupa berdasarkan kriteria tertentu. Umumnya daya tarik suatu objek wisata berdasarkan pada:

1. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.
2. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
3. Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka.
4. Adanya sarana/prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir.
5. Objek wisata alam mempunyai daya tarik karena keindahan alam pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan, dan sebagainya.
6. Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau.

2.2 Prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata

Pariwisata apapun jenis dan namanya, hendaknya dapat dibangun dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut United Nation (2002) prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Prinsip pertama adalah pembangunan pariwisata harus dapat dibangun dengan melibatkan masyarakat lokal , visi pembangunan pariwisata mestinya dirancang berdasarkan ide masyarakat lokal dan untuk kesejahteraan masyarakat lokal . Pengelolaan kepariwisataan yang telah dibangun mestinya juga melibatkan masyarakat lokal sehingga masyarakat lokal akan merasa memiliki rasa memiliki untuk peduli terhadap keberlanjutan pariwisata. Masyarakat lokal harusnya menjadi pelaku bukan menjadi penonton.
- b. Prinsip kedua adalah menciptakan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan masyarakat. Kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah tujuan yang didasarkan atas kerelaan untuk membentuk kualitas destinasi yang diharapkan oleh wisatawan. Keseimbangan tersebut akan dapat terwujud jika semua pihak dapat bekerjasama dalam satu tujuan sebagai sebuah komunitas yang solid. Komunitas yang dimaksud adalah masyarakat lokal , pemerintah lokal , industri pariwisata, dan organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat di mana destinasi pariwisata dikembangkan.
- c. Prinsip ketiga adalah pembangunan harus melibatkan para pemangku kepentingan, dan melibatkan lebih banyak pihak akan mendapatkan input yang lebih baik. Pelibatan para pemangku kepentingan harus dapat menampung pendapat organisasi kemasyarakatan lokal , melibatkan kelompok masyarakat miskin, melibatkan kaum

perempuan, melibatkan asosiasi pariwisata, dan kelompok lainnya dalam masyarakat yang berpotensi mempengaruhi jalannya pembangunan.

d. Prinsip keempat adalah, memberikan kemudahan kepada para pengusaha lokal dalam skala kecil, dan menengah. Program pendidikan yang berhubungan dengan kepariwisataan harus mengutamakan penduduk lokal dan industri yang berkembang pada wilayah tersebut harus mampu menampung para pekerja lokal sebanyak mungkin. Prinsip kelima adalah, pariwisata harus dikondisi untuk tujuan membangkitkan bisnis lainnya dalam masyarakat artinya pariwisata harus memberikan dampak pengganda pada sector lainnya, baik usaha baru maupun usaha yang telah berkembang saat ini.

e. Prinsip keenam adalah adanya kerjasama antara masyarakat lokal sebagai creator atraksi wisata dengan para operator penjual paket wisata, sehingga perlu dibangun hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Misalnya, berkembangnya sanggar tari, kelompok tani, dan lainnya karena mendapatkan keuntungan dari berkembangnya sektor pariwisata. Sementara para operator sangat berkepentingan terhadap eksistensi dan keberlanjutan atraksi wisata pada wilayah pariwisata. Idealnya harus ada keseimbangan permintaan dan penawaran yang berujung pada kepuasan wisatawan, namun demikian dalam praktiknya akan ada perbedaan mendasar

antara masyarakat lokal dan wisatawan sehubungan dengan perbedaan-perbedaan sikap terhadap pembangunan itu sendiri (Lawrence, et al., 1993). Penelitian terhadap wisatawan akan dapat menjadi jalan keluar untuk mengatasi perbedaan tersebut dengan melakukan wawancara dengan para wisatawan untuk memahami mengapa mereka memutuskan untuk mengunjungi sebuah destinasi, seberapa baik harapan mereka terpenuhi dan apa yang dapat dilakukan untuk membuat mereka tetap lebih terpuaskan. Menjaga keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan orang-orang dari semua masyarakat sangatlah penting untuk diketahui. Seperti banyak penduduk kota wisata memilih untuk tinggal di sana karena gaya hidup yang dirasakan dan faktor kemudahan, program yang dirancang untuk memfasilitasi penggunaan fasilitas, dan layanan yang dapat digunakan untuk mengurangi gesekan antara warga dan pengunjung.

- f. Prinsip ketujuh adalah, pembangunan pariwisata harus mampu menjamin keberlanjutan, memberikan keuntungan bagi masyarakat saat ini dan tidak merugikan generasi yang akan datang. Adanya anggapan bahwa pembangunan pariwisata berpotensi merusak lingkungan jika dihubungkan dengan peningkatan jumlah wisatawan dan degradasi daerah tujuan pariwisata adalah sesuatu yang logis (Hunter dan Green, 1995). Wujud hubungan ini adalah konsep tentang daya dukung yang menunjukkan suatu pendekatan manajemen yang

memungkinkan pertumbuhan dalam batas yang dapat diterima (Johnson dan Thomas, 1996)

- g. Prinsip kedelapan adalah pariwisata harus bertumbuh dalam prinsip optimalisasi bukan pada eksploitasi. Strategi manajemen kapasitas akan menjadi pilihan yang terbaik, walaupun saat ini masih mengalami kontroversi yang cukup tajam. Konsep ini merupakan kebutuhan yang semestinya diakui untuk membatasi dan menjadi kendali atas dimensi-dimensi pembangunan pariwisata yang dapat mengancam berkelanjutan penggunaan sumber daya yang terbatas, pada saat yang bersamaan, konsep tersebut berhadapan dengan keinginan untuk memaksimalkan peluang sebagai tujuan pertumbuhan dan mewujudkan manfaat potensial yang terkait dengan pengunjung yang semakin meningkat. Prinsip kesembilan adalah harus ada monitoring dan evaluasi secara periodik untuk memastikan pembangunan pariwisata tetap berjalan dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Mestinya pembangunan pariwisata dapat diletakkan pada prinsip pengelolaan dengan manajemen kapasitas, baik kapasitas wilayah, kapasitas obyek wisata tertentu, kapasitas ekonomi, kapasitas social, dan kapasitas sumberdaya yang lainnya sehingga dengan penerapan manajemen kapasitas dapat memperpanjang daur hidup pariwisata itu sendiri sehingga konsepsi konservasi dan preservasi serta komodifikasi untuk kepentingan

ekonomi dapat berjalan bersama-sama dan pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat diwujudkan.

- h. Prinsip kesepuluh adalah harus adalah keterbukaan terhadap penggunaan sumber daya seperti penggunaan air bawah tanah, penggunaan lahan, dan penggunaan sumberdaya lainnya harus dapat dipastikan tidak disalah gunakan. Untuk hal tersebut kode etik pembangunan pariwisata berkelanjutan harus dirumuskan dan menjadi agenda yang terus menerus di revisi dan bahkan revisi yang terakhir diselenggarakan di Bali (UNWTO Etic Code, 2011). Standar yang tetapkan memang masih terlalu umum untuk diterapkan oleh unit bisnis, sehingga masih perlu dilakukan penjabaran menjadi standar yang lebih rinci dalam bentuk buku manual (Font dan Bendell, 2002). Sebagai contohnya, di Eropa secara sukarela mengambil inisiatif untuk program pariwisata berkelanjutan dan menciptakan sebuah sistem federal untuk meningkatkan standar di antara program-program saat ini, telah digunakan pada 1000 akomodasi sebagai sebuah disertifikasi untuk konsumen dalam promosi, dan penawaran paket wisata mereka (Visitor, 2003). Prinsip kesebelas adalah melakukan program peningkatan sumberdaya manusia dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk bidang keahlian pariwisata sehingga dapat dipastikan bahwa para pekerja siap untuk bekerja sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga program sertifikasi akan menjadi

pilihan yang tepat. Sertifikasi sebagai proses untuk meningkatkan standar industri memiliki pendukung dan nilai kritik. Bagian ini sebenarnya meninjau kelayakan sertifikasi sebagai alat kebijakan untuk melakukan perbaikan secara sukarela, di bawah lima aspek: keadilan, efektivitas, efisiensi, kredibilitas, dan integrasi (Toth, 2002).

- i. Prinsip keduabelas adalah terwujudnya tiga kualitas yakni pariwisata harus mampu mewujudkan kualitas hidup "quality of life" masyarakat lokal, pada sisi yang lainnya pariwisata harus mampu memberikan kualitas berusaha "quality of opportunity" kepada para penyedia jasa dalam industri pariwisata dan sisi berikutnya dan menjadi yang terpenting adalah terciptanya kualitas pengalaman wisatawan "quality of experience".

2.3 Jenis dan Macam Pariwisata

Untuk lebih memperjelas mengenai pariwisata, maka penulis juga mengemukakan mengenai jenis dan macam-macam pariwisata sebagai berikut :

1. Menurut letak geografis, dimana kegiatan pariwisata dikembangkan :
 - a. Pariwisata lokal (lokal tourism), yaitu jenis pariwisata setempat yang mempunyai ruang lingkup relatif sempit dan terbatas pada tempat-tempat tertentu saja.
 - b. Pariwisata regional (regional tourism), yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu tempat atau daerah

yang ruang lingkupnya lebih luas dibandingkan dengan pariwisata lokal, tetapi lebih sempit bila dibandingkan dengan kepariwisataan nasional.

- c. Pariwisata nasional (national tourism) yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang dalam wilayah suatu negara atau bangsa.
- d. Pariwisata regional internasional, yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melwati batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut.
- e. Pariwisata internasional, yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di seluruh dunia.

2. Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran :

- a. Pariwisata aktif, yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu yang berarti pula pemasukan bagi devisa negara.
- b. Pariwisata pasif, yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala keluarnya warga negara sendiri bepergian keluar negeri sebagai wisatawan, karena uang yang seharusnya dibelanjakan di dalam negeri di bawa keluar negeri dan tidak ada arti ekonominya bagi negara sendiri.

3. Menurut alasan / tujuan perjalanan

- a. Pariwisata usaha dagang / bisnis, yaitu jenis pariwisata dimana pengunjungnya datang untuk tujuan dinas, usaha dagang, atau

yang berhubungan dengan pekerjaannya, kongres, seminar, simposium dan sebagainya.

- b. Pariwisata liburan, yaitu jenis pariwisata dimana orang yang melakukan perjalanan wisata terdiri orang yang sedang libur atau sedang cuti.
- c. Pariwisata pendidikan, yaitu jenis pariwisata dimana orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan studi atau untuk mempelajari suatu bidang ilmu pengetahuan.

4. Menurut saat atau waktu berkunjung

- a. Seasonal tourism, adalah jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada musim-musim tertentu, termasuk ke dalam kelompok jenis ini adalah summer tourism atau winter tourism.
- b. Occasional tourism, yakni jenis pariwisata dimana perjalanan wisatanya dihubungkan dengan kejadian (occasional) maupun suatu event

5. Menurut objeknya

- a. Wisata budaya, adalah jenis pariwisata dimana motivasi orang-orang untuk melakukan perjalanan disebabkan oleh daya tarik dari seni atau daerah. Jadi objek berkunjungnya
- b. Wisata bahari, Wisata bahari adalah seluruh kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan kesenangan, tantangan, pengalaman baru, kesehatan yang hanya dapat dilakukan di wilayah perairan.

- c. Wisata alam, adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi alam untuk menikmati keindahan alam yang masih alami tu sudah ada usaha budidaya.

2.4 Kerangka Konseptual

Dalam Perda Kabupten Kepulauan Selayar No. 7 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata. Pada Pasal 9 yaitu :

Garis – garis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah adalah sebagai berikut :

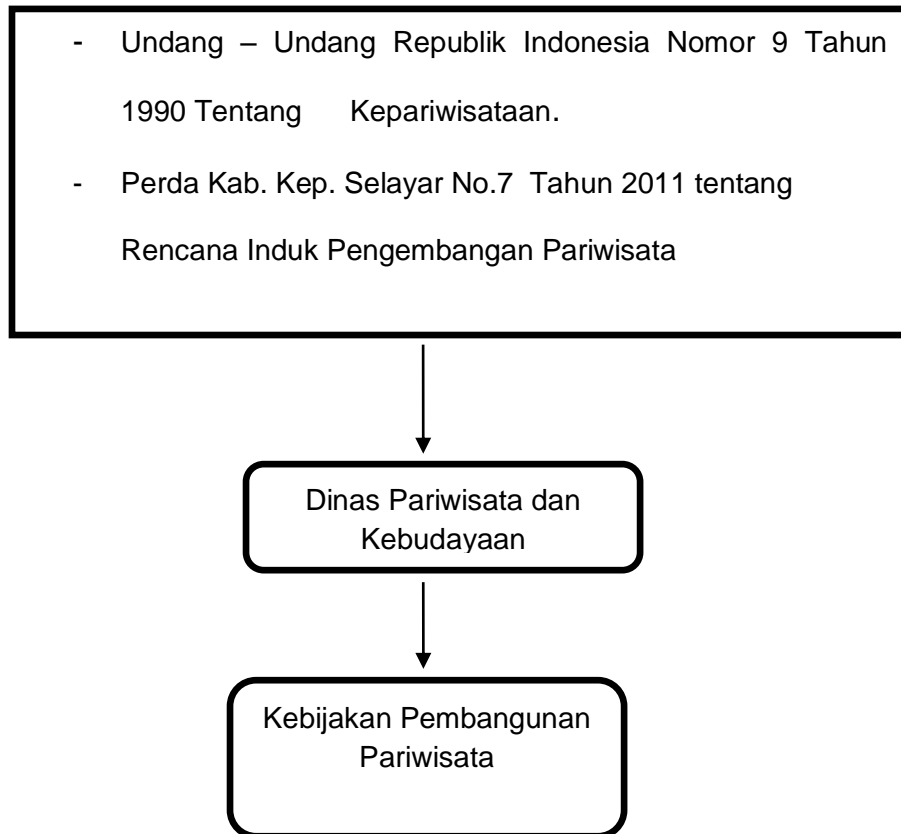
- a. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar terutama yang bergerak di bidang pariwisata terhadap peran penting pariwisata dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa dalam memasuki era globalisasi;
- b. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan terutama masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- c. Menjaga dan mengembangkan budaya lokal Kabupaten Kepulauan Selayar yang beraneka ragam sebagai aset wisata daerah, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara turun temurun dipraktekkan dan dipelihara;
- d. Meningkatkan kualitas produk, sumber daya pariwisata, dan lingkungan secara integral berdasarkan asas kesinambungan dan apresiasi terhadap norma dan nilai – nilai yang berlaku;

- e. Menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional dengan orientasi pengembangan kearah pariwisata alam dan pariwisata 8 budaya, serta menempatkan jenis pariwisata yang lain sebagai pendamping berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar dengan potensi yang tersedia; dan
- f. Menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia dan antara manusia dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata.

Dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata penyediaan anggaran merupakan bagian penting yang perlu disediakan oleh pemerintah daerah . Dalam hal ini pemerintah yang menjabat sebagai bupati harus membuat program khusus untuk pembangunan pariwisata sehingga dalam proses pembangunannya kita tidak kekurangan dana.

Adapun usaha yang harus dilakukan pemerintah dalam proses pengembangan pada obyek-obyek wisata perlu adanya peningkatan dalam sumber daya manusianya sehingga obyek-obyek wisata yang ada dapat dikelola oleh orang-orang yang berpengalaman dalam bidang pariwisata

Skema Kerangka Konseptual 2.4.1



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam meneliti permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode dan teknik penelitian yang meliputi : lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, informan penelitian, analisis data.

3. 1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi wisata yang cukup beragam dan berpotensi untuk dikembangkan. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Selayar tepatnya pada institusi/lembaga yang erat kaitannya dengan pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar serta objek wisata bahari, yakni : (1). Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, (2) Obyek wisata alam,bahari dan budaya.

3. 2 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

➤ Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah

sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian

- b. Interview atau wawancara mendalam (in dept interview) yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengadakan tanya jawab dengan narasumber yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dalam penulisan skripsi ini.
- c. Studi kepustakaan, yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku serta data-data yang terkait dengan topik penelitian. Disertai dengan undang-undang yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilaksanakan.
- d. Penelusuran data *online*, yaitu data diperoleh dengan mengakses internet untuk mencari sumber data yang berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan.

➤ Sumber Data

- a. Data Primer, data yang diperoleh dari:

Hasil observasi visual, dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi keberadaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Selayar serta objek wisata bahari. Hasil wawancara, dilakukan pada responden dari sisi pengambil keputusan (kepala dinas), pelaksana kegiatan, dan pengguna layanan (masyarakat) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tujuan

akhir yang ingin dicapai adalah menganalisis dan mengetahui kebijakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

- b. Data sekunder, data yang diperoleh dari : dokumen-dokumen, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau instansi terkait.

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pengelola Objek Wisata
3. Anggota DPR

3.4 Defenisi Operasional

Definisi Operasional lebih mengarahkan dalam melakukan penelitian ini maka disusun sebagai berikut :

- a. Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar salah satu aset daerah yang dapat dikembangkan sehingga memeberikan kontribusi besar bagi daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. Kebijakan pembangunan merupakan program/kebijakan yang akan dilaksanakan oleh aparat pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat yang ikut serta bersama-sama melaksanakan

program/kebijakan yang telah diputuskan, yang didukung oleh sarana dan prasarana yang ada dalam rangka melakukan suatu perubahan yang terencana dan berkesinambungan baik dalam pembangunan fisik ataupun non fisik.

- c. Pembangunan pariwisata merupakan hal yang dilakukan secara berkala untuk memperbaiki sistem sarana prasaran dalam rangka mengembangkan objek-objek wisata yang terdapat di suatu daerah tujuan wisata.
- d. Dinas pariwisata adalah salah satu dinas di Kabupaten Kepulauan Selayar yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pariwisata.

3.5 Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. Analisis data kualitatif ditempuh melalui reduksi data, yakni memilih hal-hal yang pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, dengan tujuan dapat memberi gambaran tentang hasil pengamatan. Display data juga akan mengambil bagian yang utama dalam rangka penyajian data dalam bentuk matriks.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Bagaimana Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar, serta menjelaskan tentang cara pemerintahan selayar dalam melaksanakan pembangunan khususnya tentang pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan selayar.

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

4.1.1 Sejarah Kabupaten Kepulauan Selayar

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten Kepulauan Selayar adalah Kota Benteng. Kabupaten ini memiliki luas sebesar 10.503,69 km² (wilayah daratan dan lautan) dan berpenduduk sebanyak ±134.000 jiwa. Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 2 sub area wilayah pemerintahan yaitu wilayah daratan yang meliputi kecamatan Benteng, Bontoharu, Bontomanai, Buki, Bontomatene, dan Bontosikuyu serta wilayah kepulauan yang meliputi kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Takabonerate, Pasimarannu, dan Pasilambena.

Pada masa lalu, Kabupaten Kepulauan Selayar pernah menjadi rute dagang menuju pusat rempah-rempah di Maluku. Di Pulau Selayar, para pedagang singgah untuk mengisi perbekalan sambil menunggu

musim yang baik untuk berlayar. aktivitas pelayaran ini pula muncul nama Selayar. Nama Selayar berasal dari kata cedaya (Bahasa Sanskerta) yang berarti satu layar, karena konon banyak perahu satu layar yang singgah di pulau ini. Kata cedaya telah diabadikan namanya dalam Kitab Negarakertagama karangan Empu Prapanca pada abad 14. Ditulis bahwa pada pertengahan abad 14, ketika Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk yang bergelar Rajasanegara, Selayar digolongkan dalam Nusantara, yaitu pulau-pulau lain di luar Jawa yang berada di bawah kekuasaan Majapahit. Ini berarti bahwa armada Gajah Mada atau Laksamana Nala pernah singgah di pulau ini.

Selain nama Selayar, pulau ini dinamakan pula dengan nama Tana Doang yang berarti tanah tempat berdoa. Di masa lalu, Pulau Selayar menjadi tempat berdoa bagi para pelaut yang hendak melanjutkan perjalanan baik ke barat maupun ke timur untuk keselamatan pelayaran mereka. Dalam kitab hukum pelayaran dan perdagangan Amanna Gappa (abad 17), Selayar disebut sebagai salah satu daerah tujuan niaga karena letaknya yang strategis sebagai tempat transit baik untuk pelayaran menuju ke timur dan ke barat. Disebutkan dalam naskah itu bahwa bagi orang yang berlayar dari Makassar ke Selayar, Malaka, dan Johor, sewanya 6 rial dari tiap seratus orang.

Belanda mulai memerintah Selayar pada tahun 1739. Selayar ditetapkan sebagai sebuah keresidenan dimana residen pertamanya adalah W. Coutsier (menjabat dari 1739-1743). Berturut-turut kemudian Selayar diperintah oleh orang Belanda sebanyak 87 residen atau yang setara dengan residen seperti Asisten Resident, Gesaghebbber, WD Resident, atau Controleur. Barulah Kepala pemerintahan ke 88 dijabat oleh orang Selayar, yakni Moehammad Oepoe Patta Boendoe. Saat itu telah masuk penjajahan Jepang sehingga jabatan residen telah berganti menjadi Guntjo Sodai, pada tahun 1942. Di zaman Kolonial Belanda, jabatan pemerintahan di bawah keresidenan adalah Reganschappen. Reganschappen saat itu adalah wilayah setingkat kecamatan yang dikepalai oleh pribumi bergelar "Opu". Dan kalau memang demikian, maka setidaknya ada sepuluh Reganschappen di Selayar kala itu, antara lain: Reganschappen Gantarang, Reganschappen Tanete, Reganschappen Buki, Reganschappen Laiyolo, Reganschappen Barang-Barang dan Reganschappen Bontobangun. Di bawah Regaschappen ada kepala pemerintahan dengan gelar Opu Lolo, Balegau dan Gallarang. Pada tanggal 29 November 1945 (19 Hari setelah Insiden Hotel Yamato di Surabaya) pukul 06.45 sekumpulan pemuda dari beberapa kelompok dengan jumlah sekitar 200 orang yang dipimpin oleh seorang pemuda bekas Heiho bernama Rauf Rahman memasuki kantor polisi kolonial (sekarang kantor PD. Berdikari).

Para pemuda ini mengambil alih kekuasaan dari tangan Belanda yang di kemudian hari tanggal ini dijadikan tanggal Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Selayar. Tahun Hari Jadi diambil dari tahun masuknya Agama Islam di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibawa oleh Datuk Ribandang, yang ditandai dengan masuk Islamnya Raja Gantarang, Pangali Patta Radja, yang kemudian bernama Sultan Alauddin, pemberian Datuk Ribandang. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1605, sehingga ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 29 November 1605. Kabupaten Selayar yang merupakan salah satu Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) yang kemudian berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan PP. No. 59 Tahun 2008.

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan satu-satunya Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang secara geografis terpisah dari daratan Pulau Sulawesi. Selayar yang dikenal dengan sebutan “Tanah Doang” yang berarti “Tanah Tempat Berdoa” adalah wilayah kepulauan dengan jumlah 130 pulau, baik berukuran besar maupun kecil yang terhampar mengarah ke utara sampai selatan. Diantara hamparan pulau-pulau

tersebut, terdapat gugusan karang atol Taka Bonerate yang merupakan atol terbesar ke-3 di dunia

4.1.2. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Selayar terletak antara 5°42'- 7°35' Lintang Selatan dan 120°15'- 122°30" Bujur Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba disebelah utara, Laut Flores sebelah timur. Laut Flores sebelah selatan dan Selat Makassar di sebelah barat.

4.1.3. Batas Wilayah

1. Sebelah Utara : Kabupaten Bulukumba
2. Sebelah Selatan : Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
3. Sebelah Timur : Laut Flores
4. Sebelah Barat : Laut Flores dan selat Makassar

4.1.4. Luas Wilayah

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan memanjang dari utara ke selatan yang terdiri dari gugusan pulau-pulau. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 Km² yang terdiri 1,357,03 Km² daratan dan 9.146,66 Km² wilayah pengelolaan laut.

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kecamatan	Luas (km²)
1	Pasimarannu	176,35
2	Pasilambena	102,99
3	Pasimasunggu	114,5
4	Taka Bonerate	221,07
5	Pasimasunggu Timur	47,93
6	Bontosikuyu	199,11
7	Bontoharu	129,75
8	Benteng	7,12
9	Bontomanai	115,56
10	Bontomatene	159,92
11	Buki	82,73

Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka (BPS, 2011)

4.1.5. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Secara administratif Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari 11 kecamatan, 81 desa dan 7 kelurahan. Sebanyak 5 kecamatan berada di kepulauan, dengan 36 desa dan 6 kecamatan berada di daratan Pulau Selayar, dengan 45 desa serta 7 kelurahan. Daftar kecamatan dan desa/kelurahan terlampir.

4.1.6. Kondisi Sosial dan Budaya

4.1.6.1 Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja dapat didefinisikan sebagai penduduk usia 15 tahun keatas, penduduk tersebut terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

4.1.6.2. Agama

Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar pada dasarnya merupakan masyarakat yang religius, beradat dan berbudaya,. Kabupaten Kepulauan Selayar adalah daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama islam dan kebanyakan berasal dari etnis Makassar yang masih mempertahankan tradisi, adat, dan keakraban. sejalan dengan hal tersebut maka tempat peribadatan bagi penganut agama islam terlihat jauh lebih banyak dari agama lain, sampai dengan akhir tahun 2012 jumlah Masjid sebanyak 173 Unit, Mushollah 24 unit sehingga jumlah tempat ibadah untuk umat muslim sebanyak 197 unit. Sementara tempat ibadah umat nasrani masing-masing tercatat 68 unit gereja protestan, 5 unit gereja katolik, umat budha 2 Unit dan hindu 1 unit.

4.1.7. Sarana dan Prasarana Umum

4.1.7.1. Pendidikan

Tingkat pendidikan di kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahunnya mengalami terselenggaranya layanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk sumberdaya manusia yang cerdas, profesional dan religius. "Peningkatan layanan pendidikan di semua

jenjang pendidikan adalah program utama sebagai jaminan terlaksananya proses pemerataan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar mengutamakan pembangunan pendidikan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini dicerminkan oleh berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengutamakan sektor pendidikan. Peningkatan layanan Pendidikan di semua jenjang pendidikan, Peningkatan Kualitas guru, peningkatan sarana dan prasarana layanan pendidikan, peningkatan kompetensi kelulusan. peningkatan kualitas layanan pendidikan nonformal dan informal, serta pembinaan pemuda dan olahraga.

4.1.7.2. Transportasi

Kabupaten Kepulauan Selayar dapat di akses melalui jalur udara dan darat. Terdapat dua maskapai penerbangan Nasional yang melayani rute ke selayar dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Jalur darat dengan menumpang bus dari terminal malengkeri menuju Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya melanjutkan perjalanan laut dengan feri penyeberangan menuju pelabuhan Pamatata dan perjalanan darat menuju Kota Benteng. Aneka alat transportasi di kota Bentengdapat dijumpai. Seperti Mobil, becak, dan perahu. Mobil digunakan sebagai angkutan dalam kota dan antar kecamatan. Becak menjadi kendaraan

yang mudah di jumpai di setiap sudut kota. Kapal laut menjadi penghubung antar pulau.

a. Jalur Darat

- Naik Bus dari terminal Malengkeri (Kapasitas 40 kursi)
- Bus berangkat jam 08.00 Wita setiap hari
- Dari terminal malengkeri menuju pelabuhan tanjung bira, Kabupaten Bulukumba. Waktu tempuh 5-6 jam.
- Dari pelabuhan tanjung bira melanjutkan perjalanan laut dengan naik feri penyebrangan menuju dermaga pamatata selayar.(terletak dibagian timur Pulau Selayar). Waktu tempuh 2 jam
- Dari dermaga pamatata melanjutkan naik bus menuju terminal kota Benteng Selayar. (Terletak di Bagian Barat Pulau Selayar)
- Tarif untuk bus Ac dari makassar sampai ke selayar Rp. 170.000,-/orang.

a. Jalur udara

- Wings Air. Tipe pesawat ATR 72 dengan kapasitas 72 kursi. Berangkat dari Makassar jam 08.55 setiap hari selasa, kamis, dan sabtu. Tarif Rp. 400.000,-/orang. Waktu tempuh selama 20 menit.
- Avia Star. Kapasitas penumpang 18 kursi. Berangkat setiap hari senin, rabu, dan jum'at. Waktu tempuh selama 40 menit

Adapun masalah transportasi menuju Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya untuk transportasi mengunjungi obyek-obyek wisata, pemerintah telah memiliki rencana untuk menghubungkan tiga provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Agar memudahkan pengunjung melakukan kunjungan wisata ke Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam rangka mewujudkan rencana tersebut pemerintah bekerjasama dengan kapal Pelni dan pengusaha-pengusaha travel.

4.2. Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar

Perubahan bentuk pemerintahan Selayar menjadi sebuah kabupaten yang dipimpin oleh seorang pejabat bernama bupati, sebenarnya bukanlah kondisi final dan puncak perjuangan rakyat bersama pemerintah. Sebaliknya, merupakan sebuah babak baru sistem pemerintahan yang senantiasa bergumul dan bergelut mencari identitas diri dalam paket pembenahan struktur pemerintahan. Karena itu, dapat dipahami bahwa pasca terbentuknya kabupaten maka sederet perubahan pun kembali terjadi baik menyangkut struktur maupun sistem pemerintahan dan bahkan kondisi perpolitikan di tingkat nasional maupun lokal turut memberi warna setiap fase dinamikan dan tahap perkembangan Selayar di kemudian hari.

Pasca terbentuknya daerah tingkat II sesuai dengan Undang-undang No. 29 Tahun 1959, Selayar secara *adaptable* berusaha

menyesuaikan diri dengan struktur pemerintahan sebagaimana yang berlaku saat itu. Maksudnya, bahwa berkaitan dengan perubahan sistem pemerintahan dari sistem demokrasi liberal ke sistem demokrasi terpimpin, menuntut berbagai langkah penyesuaian. Perubahan ini pada dasarnya terkait dengan landasan konstitusional yakni Undang-undang No. 29 Tahun 1959, sebagaimana diketahui merupakan penegasan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, sedangkan Undang-undang ini merupakan penjabaran-implementatif dari Pasal 31 dan 32 UUDS 1950.

Sejak terjadi perubahan sistem pemerintahan dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin, maka pada saat yang sama UUD dianggap tidak berlaku lagi. Hal ini berlaku tentu saja sejak dinyatakannya kembali pemberlakuan UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Perubahan sistem di tingkat pusat ini, pada gilirannya berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah-daerah. Mengenai perubahan sistem ini ditetapkan melalui Panpres No. 6 Tahun 1959 yang mengatur tentang pemerintahan daerah yang disempurnakan. Meskipun demikian, hal mengenai penyelenggaraan di bidang urusan rumah tangga daerah dan tugas perbantuan dalam pemerintahan, tetap dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan lama yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1957.

Sebagaimana halnya di daerah lain, di Kabupaten Selayar sesuai dengan Panpres tersebut struktur pemerintahan daerahnya terdiri atas kepala daerah dan DPRD (sebelumnya DPRD dan DPD). Maksudnya, bahwa pada saat ini DPD dihapus dan digantikan dengan lembaga

bernama Badan Pemerintah Harian (BPH). Dalam operasionalnya, lembaga yang baru dibentuk yakni BPH ini bertindak sebagai pelaksana tugas membantu kepala daerah. Dalam operasionalnya, Panpres No. 6 Tahun 1959 ini didasarkan atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian mengenai struktur pemerintahan dan tugas kepala daerah, yang ditetapkan dalam Pasal 1 dan 2 Panpres No. 6 Tahun 1959 adalah: (1) pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (2) dalam menjalankan tugasnya kepala daerah dibantu oleh BPH. Anggota BPH adalah pembantu-pembantu kepala daerah sebagaimana menteri-menteri negara pembantu presiden menurut sistem UUD 1945.

Kemudian menyangkut kedudukan dan fungsi kepala daerah, juga dijelaskan menurut Pasal 14 Panpres No. 6 Tahun 1959, sebagai berikut: Ayat (1) kedudukan kepala daerah, (a) alat pemerintah pusat, (b) alat pemerintah daerah; (2) sebagaimana alat pemerintah pusat, kepala daerah bertugas: (a) mengurus ketertiban dan keamanan umum daerah, (b) menyelenggarakan koordinasi antara jawatan-jawatan pemerintah pusat di daerah dan antara jawatan-jawatan tersebut dengan perintah daerah; (3) melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah di daerahnya termasuk di sini adalah mempertanggung jawabkan keputusan DPRD-nya (Panpres No. 6 Tahun 1959).

Perubahan lainnya yang terjadi terkait dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Selayar, yakni pembubaran distrik

lama. Sekadar digambarkan kembali bahwa sebelumnya terdapat sebanyak 17 Distrik di Selayar (wilayah daratan dan kepulauan). Proses pembubaran atas distrik-distrik tersebut mengacu pada Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan 16 Agustus 1961 No. 1/2/45, bersama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Selayar tertanggal 19 November 1961 No. 213/up/1961, sekaligus sebagai realisasi dari surat gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Bila mengacu pada nama-nama gubernur yang pernah menjabat di Provinsi Sulawesi Selatan, maka radiogram gubernur yang dimaksud terkait dengan pembubaran distrik adalah gubernur Brigjen Rivai yang memerintah sejak tahun 1960 hingga tahun 1966. Demikian pula mengenai keputusan bupati yang dimaksud sebagai realisasi surat edaran gubernur menyangkut pembubaran distrik, tentu saja adalah pada masa jabatan Andi Matja Amirullah (bupati pertama kabupaten Selayar) yang memerintah sejak 4 Maret 1960 hingga 10 April 1965.

Perubahan sistem pemerintahan di Selayar yang ditandai oleh pembubaran distrik, kemudian diiringi oleh pembentukan beberapa kecamatan dan membawahi desa. Hal ini terjadi pasca penyerahan pemerintahan kepada daerah otonom tingkat II dalam wilayah Sulawesi Selatan (Undang-undang No. 18 Tahun 1965). Terbentuknya kabupaten daerah tingkat II Selayar dan selanjutnya dibentuk kecamatan-kecamatan, berdasar pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Provinsi Sulawesi Selatan No. 450/XII/1965 tentang pedoman pembentukan desa gaya baru dan kecamatan bekas distrik-distrik.

Tabel 4.2
Nama-nama Bupati Kepulauan Selayar
(Sejak Tahun 1965 hingga sekarang)

No	Nama Bupati	Periode
1	Patta Tjora	1965
2	A. H. Dg. Marimba	1965 – 1968
3	Abd. Rauf Rachman	1969 – 1971
4	Andi Palioi	1971 – 1974
5	Anas Achmad	1975 – 1983
6	Ismail	1984 – 1989
7	Zaenal Arifin Kammi	1989 – 1994
8	H. M. Akib Patta	1994 – 1999
9	H. M. Akib Patta	1999 – 2004
10	H. A. Syamsul Alam Mallarangeng	2004 – 2005
11	H. Syahrir Wahab	2005 – SEKARANG

(sumber : Wikipedia.org)

4.3. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar

4.3.1. Visi

Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2010-2015 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah : “Selayar Sebagai Kabupaten Kepulauan yang maju, sejahtera dan religius”.

Visi ini memiliki makna sebagai berikut:

- a. “Maju” yang dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana infrastruktur telah memadai, sumber daya alam telah dikelola secara optimal, aksesibilitas dan interkoneksi antar daerah dan

antar wilayah telah terbangun sehingga menempatkan Selayar sebagai Kabupaten Kepulauan yang terdepan, baik dalam konteks regional dan nasional.

- b. “Sejahtera” dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan dan papan), kualitas SDM masyarakat sudah baik yang ditandai kualitas pendidikan dan kesehatan, berdaya beli tinggi, serta memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk mendukung upaya kemandirian lokal.
- c. “Religius” berarti internalisasi nilai-nilai agama dalam setiap aspek kehidupan. Ajaran Agama Islam maupun ajaran Agama lainnya, harus mampu dilaksanakan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Untuk itu seluruh kebijakan pembangunan harus berorientasi pada upaya memantapkan kehidupan yang religius, terutama kepemimpinan daerah dan aparatur agar senantiasa mencerminkan sikap dan perilaku dengan dasar keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia ditunjang oleh penerapan nilai kearifan lokal.

4.3.2. Misi:

Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode 5 (lima) Tahun RPJMD 2010-2015, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Meningkatkan Infrastruktur dasar Masyarakat

3. Memberdaykan Ekonomi Kerakyatan
4. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya alam Secara Berkelanjutan
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Penegakan Hukum
6. Mengembangkan Pembinaan Kehidupan Beragama.

4.3.3. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalisasikannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi

landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

4.3.3.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan pembangunan dalam RPJMD 2010-2015 dikelompokkan dalam setiap misi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Misi “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan tujuan:
 - 1) Meningkatkan akses, mutu dan relevansi layanan pendidikan dan perpustakaan
 - 2) Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
 - 3) Meningkatkan Keluarga Kecil Berkualitas
 - 4) Meningkatkan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 5) Meningkatkan kualitas pemuda dan olah raga
- b. Misi “Meningkatkan infrastruktur masyarakat”, dengan tujuan:
 - 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur
- c. Misi “Memberdayakan ekonomi kerakyatan”, dengan tujuan

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
 - 2) Meningkatkan daya saing daerah sehingga dapat berkontribusi bagi pembangunan lokal, regional maupun nasional
 - 3) Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang ditopang berkembangnya Usaha Kecil Menengah, Koperasi, Industri dan Perdagangan
 - 4) Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan kualitas angkatan kerja
- d. Misi “Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup”, dengan tujuan:
- 1) Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan
 - 2) Meningkatkan pengelolaan pariwisata
 - 3) Meningkatkan pengelolaan pertambangan dan energi
 - 4) Meningkatkan produksi pertanian dan peternakan dalam menopang ketahanan pangan
 - 5) Meningkatkan produksi dan terjaganya sumber daya hutan
 - 6) Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup
- e. Misi “Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum”, dengan tujuan:
- 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan, SDM, manajemen dan keuangan Pemerintahan Daerah

- 2) Meningkatkan kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Partai Politik
 - 3) Meningkatkan kualitas produk hukum dan penyelesaian kasus hukum
- f. Misi “Mengembangkan pembinaan kehidupan beragama”, dengan tujuan:
- 1) Meningkatkan kualitas pengamalan nilai-nilai keagamaan secara nyata
 - 2) Meningkatkan keharmonisan hubungan antar umat beragama

4.3.3.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Misi Pertama Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia tujuan yang telah ditetapkan pada misi pertama selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut:

- 1) *Meningkatkan akses, mutu dan relevansi layanan pendidikan dan perpustakaan*, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pemerataan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat
 - b. Meningkatnya kompetensi peserta didik dan lulusan pada semua jenjang pendidikan
 - c. Meningkatnya manajemen kependidikan

- d. Meningkatnya Profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
 - e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
 - f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
 - g. Meningkatnya minat baca masyarakat
- 2) *Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat masyarakat, dengan sasaran:*
- a. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya
 - b. Meningkatnya keberdayaan masyarakat untuk hidup sehat
 - c. Meningkatnya manajemen dan pembiayaan kesehatan
 - d. Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit
- 3) *Meningkatkan Keluarga Kecil Berkualitas, dengan sasaran:*
- a. Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB)
 - b. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan keluarga kecil berkualitas
- 4) *Meningkatkan keberdayaan perempuan dan anak, dengan sasaran:*
- a. Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan
 - b. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak
- 5) *Meningkatkan kualitas pemuda dan olah raga, dengan sasaran:*
- a. Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pemuda
 - b. Meningkatnya prestasi olah raga

Misi kedua meningkatkan dan pemeratakan Infrastruktur tujuan yang telah ditetapkan pada misi pertama selanjutnya dijabarkan dalam beberapakan sasaran sebagai berikut:

- 1) *Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur*, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya infrastruktur perhubungan
 - b. Meningkatnya infrastruktur pendidikan dan kesehatan
 - c. Meningkatnya infrastruktur perumahan dan pemukiman
 - d. Meningkatnya infrastruktur energi dan ketenagalistrikan

Misi ketiga memberdayakan ekonomi kerakyatan tujuan yang telah ditetapkan pada misi ketiga selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut:

- 1) *Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat*, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan
 - b. Meningkatnya pendapatan dan tarap hidup masyarakat
 - c. Meningkatnya keberdayaan ekonomi penyandang masalah kesejahteraan sosial
- 2) *Meningkatkan daya saing daerah sehingga dapat berkontribusi bagi pembangunan lokal, regional maupun nasional*, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pemasaran produksi barang dan jasa
 - b. Meningkatnya nilai investasi pembangunan

3) *Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang ditopang berkembangnya Usaha Kecil Menengah, Koperasi, Industri dan Perdagangan*, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya jumlah dan volume Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Masyarakat
- b. Terwujudnya kemandirian UMKM dan koperasi yang berkualitas
- c. Meningkatnya peran sektor perdagangan dan perindustrian dalam perekonomian daerah

4) *Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan kualitas angkatan kerja*, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya angka perluasan lapangan kerja
- b. Tersedianya tenaga kerja yang terampil, produktif dan terlindungi

Misi keempat mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup tujuan yang telah ditetapkan pada misi keempat selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut:

1) *Meningkatkan pengelolaan potensi perikanan dan kelautan*, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan
- b. Meningkatnya kesejahteraan nelayan
- c. Meingkatkan kontribusi perikanan dan kelautan terhadap perekonomian daerah

2) *Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan kebudayaan*, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya pengembangan pariwisata dan kebudayaan daerah
 - b. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian daerah
 - c. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pelestarian kebudayaan dan potensi pariwisata
- 3) *Meningkatkan pengelolaan pertambangan dan energi, dengan sasaran*
- a. Meningkatnya kontribusi pertambangan dalam perekonomian daerah
 - b. Meningkatnya efektifitas penambangan mineral bukan logam dan batuan
- 4) *Meningkatkan produksi pertanian dan peternakan dalam menopang ketahanan pangan, dengan sasaran:*
- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi pertanian
 - b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi peternakan
 - c. Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi
- 5) *Meningkatkan produksi dan terjaganya sumber daya hutan, dengan sasaran:*
- a. Meningkatnya produksi sumber daya hutan
 - b. Meningkat dan terjaganya potensi sumber daya hutan
- 6) *Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup, dengan sasaran:*
- a. Meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan hidup
 - b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
 - c. Meningkatnya kualitas pertamanan

- d. Meningkatnya kualitas pelayanan sampah
- e. Meningkatnya kualitas pengendalian tata ruang
- f. Meningkatnya pencegahan dini dan penanggulangan bencana

Misi kelima meningkatkan tata kelola pemerintahan dan supremasi hukum tujuan yang telah ditetapkan pada misi kelima selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut:

1) *Meningkatkan kapasitas kelembagaan, SDM, manajemen dan keuangan Pemerintahan Daerah*, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan
- b. Meningkatnya penelitian yang berkualitas dan aplikatif
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan
- d. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan
- e. Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa
- f. Meningkatnya kualitas informasi
- g. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- h. Meningkatnya kemandirian keuangan
- i. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
- j. Pemenuhan kebutuhan dan tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas

2) *Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan partai politik*, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi kepada ormas dan partai politik
 - b. Meningkatnya peran serta masyarakat perdesaan dan organisasi pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan
- 3) Meningkatkan kualitas produk hukum dan penyelesaian kasus hukum, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya kualitas dan penyelesaian produk hukum
 - b. Meningkatnya penyelesaian kasus hukum
 - c. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda)

Misi keenam mengembangkan pembinaan kehidupan beragama tujuan yang telah ditetapkan pada misi keenam selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pengamalan nilai-nilai keagamaan secara nyata, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat
 - b. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan bermasyarakat
 - c. Meningkatnya kualitas sarana prasarana ibadah
 - d. Meningkatnya kapasitas dan kesejahteraan SDM Keagamaan
- 2) Meningkatkan keharmonisan hubungan antar umat beragama, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya kerukunan hidup antar umat beragama
- b. Meningkatnya kerjasama umat beragama dalam kegiatan-kegiatan sosial

4.4. Strategi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

Strategi pembangunan merupakan suatu cara pandang bagaimana melihat manusia sebagai subjek dan objek pembangunan dalam keseimbangan yang harmonis dengan lingkungan fisik, sosial dan budayadan ekonomi. Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode 5 (lima) Tahun RPJMD 2010-2015, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kualitas sumber daya manusia menjadi indikator yang sangat penting dalam proses maupun pencapaian tujuan pembangunan. Tidak ada Negara di dunia ini mampu menjadi Negara maju jika tidak berangkat pada titik pijak pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia, diantaranya melalui capaian target-target Millenium Development Goals (MDGs). Manusia adalah subjek dan objek pembangunan. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia berarti pemenuhan kebutuhan pendidikan secara memadai, kesehatan secara utuh yang berkeadilan untuk seluruh masyarakat.
2. Meningkatkan infrastruktur Membangun, meningkatkan dan pemeratakan infrastruktur agar bisa hidup layak, tidak terisolasi,

memperlancar mobilitas masyarakat, barang dan jasa, mengurangi kesenjangan antar wilayah, meningkatkan keterkaitan antar wilayah, meningkatkan aktivitas sosial lainnya sehingga masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Infrastruktur yang dimaksudkan yaitu jalan, jembatan, sarana air bersih dan sanitasi, energy, dan prasarana wilayah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan infrastruktur untuk dapat membuka akses ke berbagai kantong produksi dan dapat mempermudah pemasaran hasil-hasil produksi yang kemudian dapat mendorong pergerakan perekonomian daerah.

3. Memberdayakan ekonomi kerakyatan Membangun fondasi ekonomi masyarakat dari sektor riil dan berbasis kerakyatan yang tangguh dan berproduksi tinggi dengan memfasilitasi berkembangnya unit-unit usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi yang sehat, yang akan memperluas kesempatan kerja dengan intervensi pada aksesibilitas modal lunak dari perbankan pemerintah maupun lembaga keuangan non bank, manajemen usaha dan ekspansi skala usaha. Memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menikmati pembangunan ekonomi secara lebih baik dan mereka juga dapat lebih jauh terlibat dalam aktivitas ekonomi. Kebijakan ini dilakukan dengan pendekatan yang tidak saja mengutamakan pertumbuhan tetapi juga

distribusi, atau dikenal dengan “pertumbuhan dengan pemerataan” (growth with equity) dalam mewujudkan “pertumbuhan dengan basis yang luas” (broad-based growth). Pendekatan ekonomi kerakyatan ini berfokus kepada 3 (tiga) hal, yaitu: a. Mengedepankan kebijakan pada penciptaan keadaan yang mendorong dan mendukung usaha – usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan memecahkan permasalahan mereka sendiri pada tingkat individual, keluarga, dan komunitas. b. mengembangkan kelembagaan ekonomi yang berfungsi dan sesuai kaidah-kaidah organisasi yang mandiri. c. mengembangkan sistem produksi berdasarkan sumberdaya di setiap kawasan dan wilayah.

4. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sumber daya alam yang melimpah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, pertambangan, dan energy, perlu dikelola secara optimal sehingga sumber daya alam itu tidak hanya dieksploitasi oleh segelintir orang tetapi dinikmati dan mampu memenuhi kebutuhan bahkan mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa melupakan pelestarian lingkungan.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan penegakan hukum memegang peranan yang sangat penting dalam rangka terwujudnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

6. Mengembangkan pembinaan kehidupan beragama. Paham keagamaan selalu menjadi landasan dalam setiap gerak pembangunan bangsa sebagai pondasi dan benteng bagi kita terhadap pengaruh buruk dari globalisasi.

Dalam melaksanakan pembangunan, harus dibarengi dengan perencanaan anggaran yang tepat sehingga dapat berjalan sesuai standart operasional yang telah di susun oleh pemerintah daerah. Sehingga dibutuhkan perhatian khusus untuk melanjutkan pembangunan pariwisata. Salah satu yang dapat mewujudkan hal tersebut pemerintah harus memasukkan pembangunan pariwisata dalam visi misinya yang kemudian akan dibuatkan dalam RPJMD.

4.5. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan salah satu perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dalam Perbup Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut :

Pembentukan susunan organisasi dan formasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ditetapkan dengan peraturan daerah, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Adapun Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata dan salah satu pelaku pembangunan kebudayaan dan pariwisata daerah merumuskan visi sebagai berikut “Menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai destinasi Pariwisata Bahari Unggulan Sulawesi Selatan”.

Visi tersebut memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai, guna memberikan fokus terhadap program yang dilaksanakan maupun untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- a. Membangun kawasan pengembangan pariwisata serta jaringan informasi dan promosi pemasaran.
- b. Meningkatkan penguatan sinergitas lembaga dan peran serta masyarakat dalam pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.
- c. Menggambarkan kebudayaan daerah dan hasil-hasil budaya yang menggambarkan sejarah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

4.6 Gambaran Umum Objek Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar

Pulau Selayar menawarkan bentangan alam yang menyimpan banyak pesona keindahan yang begitu menakjubkan. Pemandangan alam bawah laut dengan beragam jenis makhluk penghuninya, panorama pantai berpasir yang eksotis adalah daya tarik utamanya. Tidak hanya

itu, air terjun yang bersusun tujuh, gua-gua alam dan warisan sejarah dan budaya menjadi daya tarik wisata tersendiri yang dapat dinikmati. Beragamnya daya tarik wisata di Selayar menjadikannya salah satu destinasi pariwisata di Sulawesi Selatan yang wajib untuk dikunjungi. Obyek pariwisata yang dikembangkan oleh pemerintah berpusat kepada obyek wisata bahari. Ada 3 wisata bahari yang menjadi sasaran utama pemerintah yaitu taka bonerate, pantai timur dan pantai barat.

Dan masih banyak obyek-obyek wisata yang perlu dikembangkan oleh pemerintah dikarenakan keterbatasan sumber daya manusianya sehingga pemerintah agak kesulitan dalam meningkatkan pembangunan/pengembangan obyek-obyek wisata yang ada menurut keterangan dari pemerintah setempat bahwa sebenarnya kita masih kekurangan tenaga untuk mengelola obyek wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adapun objek wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan objek penelitian yang terdiri dari wisata alam, wisata budaya dan wisata bahari sebagai berikut :

4.6.1 Wisata budaya (Gong Nekara)

4.6.1.1 Sejarah Gong Nekara

Gong Nekara adalah sebuah benda kuno peninggalan sejarah dan purbakala yang terdapat di kabupaten Kepulauan Selayar. legenda mengenai nekara Selayar dikenal dari dua sumber, yang pertama cerita

mitos Sawerigading yang berkembang pada periode Galigo, yaitu periode kekuasaan manusia dewa yang mengatur tata tertib dunia, dengan pola kepemimpinan religius kharismatis. Sawerigading ditempatkan sebagai tokoh utama dalam perwujudan tata tertib dan penataan pertama masyarakat Bugis-Makasar di Sulawesi Selatan. Periode Galigo diperkirakan berlangsung sekitar abad ke-7 sampai abad ke-10. Sesuai tutur informasi Lontara yang dimilikinya bahwa Gong Nekara tersebut yang mula-mula membawanya adalah We Tenri Dio anak ke-dua dari sawerigading.

We Tenri Dio yang digelar Tumanurung adalah raja pertama yang memerintah pada kerajaan Putabangung dan gong nekara itu adalah merupakan simbol pemerintahan atau lambang kerajaan, gong juga berfungsi sebagai alat komando pada saat itu. Setelah lama-kelamaan dan melampaui beberapa raja atau pemerintahan pada kerajaan tersebut, maka sampailah kepada raja terakhir yang bernama Sumahe Dg. Mappasang (Turunan dari We Tenri Dio).

Sumber yang kedua adalah naskah Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa (abad 17). Selayar disebut sebagai salah satu daerah tujuan niaga. Letaknya sangat strategis bagi pelayaran yang menuju ketimur maupun ke barat. Dengan demikian Selayar menjadi bandar transito bagi lalu lintas pelayaran. Di dalam naskah itu juga disebut tentang “daftar sewa bagi orang yang berlayar dari daerah Makasar ke Aceh, Kedah, Kamboja dengan sewa 7 rial dari tiap seratus

(orang) dan apabila naik dari tempat tersebut pergi ke Selayar, Malaka, Johor, sewanya 6 rial dari tiap seratus (orang).”

Dari sumber tersebut memberikan keterangan tentang peranan Selayar dengan daerah-daerah di Nusantara dan Asia Tenggara. Hal ini memperkuat dugaan bahwa nekara Selayar mungkin didatangkan dari daratan Asia Tenggara pada waktu pengaruh kebudayaan Cina berkembang di kawasan itu. Menurut legenda yang berkait dengan nekara Selayar, dikatakan bahwa ketika Sawerigading bersama isterinya (We Cuddai) dan ketiga putranya (La Galigo, Tenri Dio, dan Tenri Balobo) kembali dari Cina, dalam perjalanannya menuju ke Luwu mereka singgah di Pulau Selayar, dan langsung menuju ke suatu tempat yang disebut Puta Bangung dengan membawa sebuah nekara perunggu yang besar. Di tempat itu mereka dianggap sebagai Tumanurung. Pada saat itulah Tenri Dio dianggap menjadi raja pertama di Puta Bangung, dan menempatkan nekara itu sebagai Kalompoang di Kerajaan Puta Bangung.

Dari cerita itu dapat disimpulkan bahwa nekara Selayar dibawa dari Cina oleh Sawerigading. Yang dimaksud dengan Cina disini, mungkin adalah Indo China. Selain itu, masyarakat juga menganggap bahwa hanya ada dua nekara (Gong), yaitu sebuah di Selayar dan sebuah lagi berada di Cina. Nekara yang ada di Selayar dianggap sebagai suami dan yang ada di Cina sebagai isteri. Hal ini mengingatkan kita pada nekara yang dipuja berpasangan di daerah Birma yang dipersonifikasikan sebagai pasangan suami isteri. Nekara yang di atasnya terdapat hiasan katak

berukuran lebih tinggi melambangkan pria, sedangkan yang tidak memakai hiasan katak dan berukuran lebih kecil dan rendah melambangkan wanita. Dengan demikian nampak adanya persamaan nilai simbolis dari pendukung kebudayaan perunggu khususnya nekara di Indonesia dan Asia Tenggara.

4.6.1.2 Struktur Gong Nekara

Gong Nekara Selayar terbuat dari logam perunggu yang saat ini tersimpan di daerah Bonto Bangun (Matalalang). Bagi pengunjung yang ingin melihat langsung Gong Nekara harus menempuh jarak 4 km sebelah selatan kota Benteng. Nekara ini merupakan nekara yang besar dan indah dengan ukuran tinggi 92 cm dan garis tengah bidang pukul berukuran 126 cm. Seluruh permukaan bidang pukul dihiasi dengan pola hias geometris. Di bagian tengah dihiasi dengan pola hias bintang bersudut 16 dan di tepinya terdapat hiasan berbentuk 4 ekor katak, yang masing-masing panjangnya 20 cm dengan badan bergaris-garis dan mata tersembul ke atas, juga hiasan burung merak sedang berdiri ataupun sedang berjalan. Hiasan lainnya adalah bentuk perahu yang sarat dengan pola hias bulu burung. Di bawah perahu terdapat ikan yang sedang berenang. Pada bagian pinggang yang berbentuk silinder terdapat panel-panel yang dihiasi dengan pola hias geometris dalam posisi vertikal, sedang ruang yang terletak di antara dua buah panel penuh dengan pola hias bulu burung dengan posisi vertikal. Pada bagian kaki dijumpai ragam hias yang menarik, dan merupakan pola hias yang sangat spesifik dari nekara

Selayar. Hiasan itu terdiri dari motif gajah, pohon kelapa, burung bangau, serta burung-burung kecil yang sedang hinggap di cabang-cabang pohon yang tak berdaun. Pada nekara ini juga terdapat empat pasang telinga atau pegangan, menempel dari bagian bahu ke pinggang serta dihiasi dengan motif tali.

Penjaga Gong Nekara bapak Jaenudin mengatakan bahwa :

“Sempat pula salah satu arca kodok dicuri oknum tidak bertanggung jawab dan setelah sekian tahun arca kodok tersebut ditemukan di Jakarta sehingga Pemprov kemudian membuatkan rumah dan dijaga agar tidak terulang lagi kejadian yang sama. Akibat kejadian itu, pemerintah provinsi berinisiatif membuatkan sebuah ruangan khusus di dekat kantor kelurahan yang terletak dusun Matalalang, Kelurahan Bontobangun. Hingga saat ini Gong Nekara tersebut langsung diawasi oleh Cagar Budaya Makassar dan juga setiap bulannya dilakukan pelaporan kepada Cagar Budaya Makassar”. (wawancara pada tanggal 09 Juli 2015)

Adapun jadwal kunjungan ke Gong Nekara :

- Senin-jumat : 07.00-12.00 wita
- Sabtu –minggu : libur (tapi biasanya masih menerima kunjungan bila menelfon langsung penjaga Gong Nekara untuk dibukakan)

4.6.2 Wisata Alam (Gua Tajuiya)

Kolam mata air Tajuiya yang terletak di sekitar 35 kilometer utara kota benteng. Ibukota kabupaten kepulauan selayar. Mata air tajuiyya merupakan sumber air bagi warga dua kampung sekitarnya yaitu, Tajuiyya dan Kampung bau. Bagi pengunjung dimungkinkan untuk

berkunjung ke liang Tajuiyya yang berjarak seitar 10 km dari pelabuhan fery. Ata air yang dalam karena untuk mengambilnya warga harus menuruni anak tangga beton sebanyak 45 anak tangga. Berkelok, terjal pula. Untuk melihat airnya kita pun harus menurun jalan batu. Letaknya sisi utara gua. Airnya tidak terlihat dari tangga.

Saat sampai di ujung tangga, kita masih harus menuruni batu-batu karang purba dan batu-batu tersebut sangat licin. Di atas gua, menggantung ribuan kelelawar yang bercicit, bau amis kotorannya menyeruak kemana-mana. Kotoran berjatuhan di atas batu kapur. Saat menuruni bebatuan, kami melewati satu cangkang kima raksasa (jenis *Tridacna gigas*), panjangnya sekitar 30 cm. Terbalik. Sepertinya dasar gua merupakan permukaan pulau yang anjlok. Di ujung longsor, di situlah letak mata air tersebut.

Setelah menuruni lagi hingga 10 meter kita sampai di sumber air. Di sisi tebing telah terpasang satu pipa besi bercat biru, diameternya kira-kira 10 cm. Di ujungnya terdapat mesin penyedot air. Tapi dasar kolam yang terisi air tidak terlihat luas. Entah jika ada terowongan bawah tanah yang menjadi kolam lanjutan tapi tidak terlihat.

Beberapa meter dari mata air ini menjulang beberapa pohon tinggi di dala area kolam tinggi sekali, kira-kira 30 meter. Karena tinggi dan rimbunnya dia nyaris menutup cahaya matahari masuk ke dasar. Namun dari hasil observasi langsung ke Gua Tajuiya tepatnya pada tanggal (27 Juli 2015) terlihat belum dikembangkan oleh pemerintah sebagai salah

satu situs resmi obyek wisata yang dapat di kunjungi oleh para wisatawan.

4.6.3 Wisata Bahari (Pantai pabaddilang)

Pantai Pa'badilang adalah salah satu obyek wisata alam kepulauan selayar yang terletak di Desa Bongaiya, Kecamatan Bontoatene. Pantai berukuran panjang 75 meter ini, berjarak sekitar 40 km ke arah utara pusat ibukota kabupaten benteng, selayar. Dan 5 km dari arah pelabuhan ferry pamatata. Dapat di tempuh dengan memakai kendaraan roda dua dan roda empat.

Di Pantai pa'badilang selain dapat berjemur di atas hamparan pasir putihnya yang lembut dan menikmati eksotisme pemandangan deretan pohon nyiur melambai yang tumbuh rapi di sepanjang pantai dan melengkapi panorama gugusan pulau-pulau di sekitarnya.

Di lokasi yang sama, mata pengunjung juga akan turut di manjakan oleh panorama alam sunset di sore hari. Semua akan terasa lebih sempurna dan maksimal, jikalau pengunjung sempat meluangkan waktu untuk menjejal pesona keindahan alam bawah laut "*Pantai Pa'badilang*" dengan melakukan aktivitas snorkeling, diving, swimming, fishing maupun sun bathing.

Layaknya sebuah daerah tujuan wisata, area bibir "*Pantai Pa'badilang*" turut dilengkapi dengan fasilitas rest house terdaftar sebagai tempat beristirahat dan mengganti pakaian, se usai melakukan aktivitas rekreasi. Menurut panuturan penjaga loket tiket di pintu masuk

“Pantai Pa’badilang” bahwa pengunjung akan ramai biasanya pada waktu-waktu lebaran atau tahun baru dan biasanya pada hari sabtu atau minggu dan untuk hari-hari lainnya pengunjung tidak begitu ramai dikarenakan hari bersekolah dan bekerja.

Dari ketiga Obyek wisata diatas yang saat ini sedang dikelola langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baru terdapat satu yaitu *“Pantai Pabaddilang”*. Menurut hasil wawancara dari Kabid Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa :

“ saat obyek wisata yang dikelola langsung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya Pantai Pa’badilang yang bekerjasama langsung dengan masyarakat sekitar pantai untuk mengelola retribusi”. (wawancara pada tanggal : 09 juli 2015).

Jadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk mengelola retribusi jadi mereka yang melakukan pemungutan, ada beberapa obyek retribusi seperti parkir, biaya masuk. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan kewenangan ke desa dan desa menunjuk orang tersebut sebagai pengelola retribusi. Adapun honorinya berapa persen yang dia dapat telah diatur dalam aturan keuangan sekitar 5%. Menurut penu

4.6.4 Pengunjung

Jumlah pengunjung wisata pada setiap tahunnya banyak mengalami peningkatan. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan pemerintah telah melakukan usaha dengan mempromosikan obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Selayar menggelar berbagai antraksi wisata mulai dari wisata bahari, alam dan kuliner hingga wisata seni sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kepulauan Selayar, Disbudpar Kabupaten Kepulauan Selayar berencana meluncurkan website yang akan memuat informasi dan promosi pariwisata di Bumi Tana Doang.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Kabupaten Kepulauan selayar mengatakan bahwa :

“untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kepulauan Selayar diperlukan infrastruktur yang mendukung. Sehingga memudahkan wisatawan untuk berkunjung ke obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar seperti sarana transportasi darat, udara dan laut yang dapat mengantarkan pengunjung”. (wawancara pada tanggal 09 juli 2015)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami ahwa pemerintah telah menyadari keterbatasan untuk mendorong pembangunan pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar. Sehin dengan demikian seyogyanya pemerintah menciptakan suatu regulasi untuk mengatasiketerbatasan tersebut yang nantinya akan menunjang pembangunan.

Data sekunder kunjungan wisatawan pada setiap tahun khususnya untuk wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara yang melakukan kunjungan wisata ke Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 4.3
Data Kunjungan Wisatawan
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	URAIAN	JUMLAH KUNJUNGAN									
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	WISATAWAN DOMESTIK	1,819	2,900	2,950	3,489	5,979	5,470	4,377	4,645	4,005	4,379
2.	WISATAWAN MANCANEGARA	110	145	72	169	212	218	142	98	124	280
JUMLAH TOTAL		1,929	3,045	3,022	3,658	6,191	5,688	4,519	4,743	4,129	4659
TOTAL PENINGKATAN			57.85	-0.75	21.05	69.25	-8.12	-20.55	4.96	-12.95	11,1

- Presentasi kunjungan wisatawan MANCANEGARA jika dibandingkan Th. 2013 200%
- Banyaknya Negara yang telah mengunjungi Kep. Kep. Selayar 11 Negara antara lain :
 1. Jerman
 2. Swiss
 3. Australia
 4. Thailand
 5. Austria
 6. Perancis
 7. Inggris
 8. Belanda
 9. Jepang
 10. Cina
 11. Polandia

(Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar)

4.7 Pendapatan Asli Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar

Adapun pendapatan tiap tahun dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Yang setiap tahunnya di hasilkan oleh obyek wisata kemudian

masuk ke kas Disbudpar yang kemudian di setor ke daerah. yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4
DATA PAD
Dinas kebudayaan dan Pariwisata

No.	Tahun	Target	Realisasi
1.	2010	67.000.000	78.226.200
2.	2011	8.000.000	1.314.000
3.	2012	44.000.000	2.858.000
4.	2013	25.000.000	10.434.000
5.	2014	20.000.000	19.640.000

(Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar)

Tabel 4.5 menjelaskan keseluruhan pendapatan yang di dapatkan setiap tahunnya dari seluruh obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar yang terkadang tidak sesuai dengan target yang ada.

4.8 kebijakan pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar

Kabupaten Kepulauan selayar merupakan salah satu Kabupaten Kepulauan Yang indah yang didominasi oleh wisata bahari serta wisata alam dan budaya. Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Bidang Pariwisata dan Budaya yang tertuang dalam Perda Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 13 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut :

a. Pariwisata

Urusan pariwisata diprioritas pada program pembangunan yang meliputi :

- 1) Program pengembangan pemasaran pariwisata;
- 2) Program pengembangan destinasi pariwisata;
- 3) Program pengembangan kemitraan pembangunan pariwisata

b. Kebudayaan

Urusan Kebudayaan diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi:

- 1) Program pengembangan nilai budaya;
- 2) Program pengelolaan kekayaan budaya;
- 3) Program pengelolaan keragaman budaya; dan
- 4) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

Sedangkan dalam Perda No.7 Tahun 2011 tentang Rencana induk Pengembangan Pariwisata pada Pasal 9 pemerintah mencoba mengembangkan pariwisata dengan beberapa strategi sebagai berikut:

Garis – garis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar terutama yang bergerak di bidang pariwisata terhadap peran penting pariwisata dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa dalam memasuki era globalisasi;

- b. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan terutama masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- c. Menjaga dan mengembangkan budaya lokal Kabupaten Kepulauan Selayar yang beraneka ragam sebagai aset wisata daerah, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara turun temurun dipraktekkan dan dipelihara;
- d. Meningkatkan kualitas produk, sumber daya pariwisata, dan lingkungan secara integral berdasarkan asas kesinambungan dan apresiasi terhadap norma dan nilai – nilai yang berlaku;
- e. Menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional dengan orientasi pengembangan kearah pariwisata alam dan pariwisata 8 budaya, serta menempatkan jenis pariwisata yang lain sebagai pendamping berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar dengan potensi yang tersedia; dan
- f. Menciptakan hubungan yang harmonis antarmanusia dan antara manusia dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata.

Mengacu dari Perda No.7 Tahun 2011 tentang Rencana induk Pengembangan Pariwisata pada Pasal 9 maka dalam melaksanakan pembangunan pariwisata pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar saat

ini belum sepenuhnya terlaksana. Disebabkan oleh kurangnya pengelola pada daerah obyek wisata.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan, suatu daerah harus memiliki prioritas utamanya dalam membangun infrastruktur yang akan dilaksanakan di daerahnya masing-masing. Dalam rangka melaksanakan suatu pembangunan harus memiliki anggaran yang jelas karena pemerintah tidak bisa membangun begitu saja tanpa adanya anggaran yang jelas, jadi harus dibuatkan estimasi khusus untuk pembangunan pariwisata.

Anggota DPR Ketua komisi C bagian pembangunan mengatakan bahwa :

“ saat ini pemerintah belum menjadikan pembangunan pariwisata sebagai pusat pembangunan untuk mengembangkan selayar dikarenakan ada pada visi misi bupati saat ini tidak memusatkan pembangunan pada Pariwisata saja. Jika pariwisata ingin dikembangkan harusnya dalam visi misi calon bupati yang akan terpilih harus di masukkan sebagai program agar nantinya dapt dimasukkan dalam RPJMD sehingga kita dapat merencanakan anggaran dan kebijakan yang sesuai dengan visi misi yang ada utamanya untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar”. (wawancara pada tanggal 31 juli 2015)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan bahwa pembangunan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar belum menjadi prioritas utama pemerintah daerah dikarenakan bupati yang menjabat saat itu tidak memasukkan pembangunan pariwisata sebagai visi misinya. Dalam hal ini jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pembangunan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya harus membuat visi misi yang mengarah kepada peningkatan pembangunan pariwisata

agar selanjutnya dimasukkan dalam RPJMD kemudian di ajukan ke RKPD dan SKPD.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa :

“obyek wisata yang baru di kelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya Pantai Pa'baddilang yang langsung bekerjasama dengan masyarakat sekitar. Selebihnya untuk obyek wisata yang lain belum dikembangkan langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. (wawancara pada tanggal 8 juli 2015)

Dalam hal ini pemerintah tidak bisa serta merta melakukan pembangunan di bagian pariwisata begitu saja karena dalam sebuah rancangan pembangunan harus memiliki perencanaan dan anggaran khusus untuk pembangunan tersebut. Adapun pembangunan pariwisata untuk Kabupaten Kepulauan Selayar saat ini belum dijadikan prioritas utama bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam mengembangkan pariwisata daerah harus memiliki infrastruktur yang mendukung wisata agar dapat berkunjung ke berbagai obyek-obyek wisata yang ada.

Ada banyak obyek pariwisata di kabupaten kepulauan selayar yang menurut pemerintah daerah Selayar membutuhkan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka membangun pariwisata yang ada. Melalui kerjasama tersebut pemerintah dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Pemerintah mengembangkan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak

baik masyarakat maupun swasta. Akan tetapi pemerintah belum banyak melakukan kerjasama dengan pihak swasta.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa :

“kerjasama yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan pihak swasta salah satu bentuk kerjasamanya yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar bergabung dengan Asosiasi Kapal Pesiar yang disebut dengan ASWINDO. Dimana kapal pesiar tersebut melakukan kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Selayar setiap sekali dalam setahun. Kapal pesiar tersebut membawa wisatawan asing dari Amerika yang selanjutnya akan berkunjung ke taka bonerate”.(wawancara pada tanggal 08 juni 2015)

Selanjutnya dari beberapa kerjasama yang dilakukan dengan pihak swasta ada juga kapal pelni untuk tujuan selayar memiliki program menghubungkan 3 provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Tim survei dari Pelni sedang meramu paket wisatanya melalui kunjungan langsung ke obyek wisata yang ada sehingga mereka dapat membuat rute yang tepat untuk tujuan wisata ke selayar. Sehingga usaha-usaha travel dapat memanfaatkan moment tersebut untuk membuka rute kunjungan pariwisata ke Kabupaten Kepulauan Selayar dan dapat bekerjasama dengan pemerintah setempat.

Ditambahkan lagi oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa :

“ada beberapa pengusaha-pengusaha travel yang mengajak untuk bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dan saat ini sudah ada satu yang mencoba bekerjasama dan akan dilakukan uji coba pada bulan september 2015. (wawancara pada tanggal 09 juli 2015)

Dari hasil wawancara tentang ada atau tidaknya kerjasama antara swasta dan pemerintah saat ini belum terealisasi dengan baik karena saat ini belum ada perusahaan yang memang bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mengembangkan obyek-obyek wisata. Dalam hal ini pemerintah masih mengharapkan adanya pihak swasta yang bersedia bekerjasama dengan pemerintah setempat sehingga dapat membantu membuka peluang kerja bagi masyarakat. Obyek-obyek wisata yang ada di sebenarnya belum dapat dikembangkan dengan baik dikarenakan kekurangan anggaran untuk pengembangannya dan juga masih kurangnya orang-orang yang berpengalaman dalam mengelolah obyek wisata yang ada sehingga sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang cakap dan mampu mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pemerintah Daerah telah banyak melakukan event-event untuk menarik minat para wisatawan untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata di Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya pemerintah akan mencoba membuat kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan pariwisata sehingga dapat dikembangkan lagi agar menjadi daerah wisata yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab IV yang menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Potensi Obyek wisata (bahari, budaya dan alam) di Kabupaten Kepulauan Selayar, saat ini masih perlu untuk dikembangkan akan tetapi karena keterbatasan sampai saat ini belum ada yang dapat mengelola beberapa tempat wisata yang dianggap perlu untuk dikembangkan. Hingga saat obyek wisata yang dikelola langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya obyek wisata bahari “Pantai Pabaddilang” yang bekerjasama dengan masyarakat sekitar dalam pemungutan retribusinya, Obyek wisata alam “Gua Tajuiya” hanya dijadikan masyarakat sekitar sebagai tempat mengambil air bersih karena di dalam gua tersebut terdapat mata air dan wisata budaya “Gong Nekara” yang mengelola adalah masyarakat sekitar obyek wisata yang dibawah langsung oleh cagar budaya makassar. Kedepannya dinas pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar akan menindaklanjuti hal ini selain demi pengembangan sumber daya manusia juga untuk pengembangan pariwisata. Dalam rangka pembangunan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar, Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan berbagai upaya seperti mempromosikan objek-objek wisata melalui berbagai media baik cetak seperti koran dan majalah wisata, maupun elektronik seperti stasiun televisi dan promosi langsung seperti ikut kegiatan pameran dan expo serta seringnya juga dilakukan event-event untuk mempromosikan obyek-obyek wisata di Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Kebijakan Pembangunan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar belum menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar saat tidak memiliki Visi Misi khusus tentang pembangunan pariwisata sehingga dalam pembangunan pariwisata saat ini belum menjadi prioritas utamanya. Karena untuk melaksanakan pembangunan diperlukan suatu anggaran yang jelas sebagai acuan untuk dimasukkan dalam RPJMD sehingga rancangan untuk pembangunan estimasinya jelas dan terarah. Namun saat ini belum ada tindakan nyata pemerintah untuk mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

5.2. Saran

1. Perlu adanya kerjasama dengan pihak swasta, dalam hal ini pihak investor untuk pembangunan dan pengembangan objek wisata daerah yang ada dikarenakan terbatasnya anggaran dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk mengelola sektor Pariwisata, sehingga upaya pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

berhasil dengan maksimal dan berjalan dengan baik dan lancar dalam perekrutan atau penerimaan pegawai baru terutama untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka Pemerintah Daerah perlu memperhatikan kualitas maupun pendidikan yang dimilikinya agar kemampuan para pelaksana di lapangan semakin baik dan memiliki inovasi-inovasi baru dalam mempromosikan obyek-obyek wisata di Kabupaten Kepulauan Selayar. Diperlukan adanya perhatian yang mendalam dari Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, agar upaya pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan bisa memberikan hasil yang optimal dan bisa dijadikan sebagai salah satu sektor andalan daerah dan hendaknya memanfaatkan secara maksimal potensi-potensi wisata yang dimiliki, seperti adanya perbaikan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana pariwisata, serta perbaikan jalan menuju objek wisata.

2. Bagi bupati selanjutnya diharapkan menjadikan pembangunan pariwisata sebagai salah satu bentuk visi misinya sehingga dapat dimasukkan dalam RPJMD dan kemudian di ajukan ke SKPD dan RKPD. Sehingga dapat dibuatkan anggaran khusus untuk pembangunan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Obyek-obyek wisata di Kabupaten Kepulauan Selayar masih banyak yang perlu dieksplor dan dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Anonymous, 1991. *Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional*, Jakarta: Paradiptia.
- Nasution, Zulkarimen. 2012. *Komunikasi Pembangunan pengenalan teori dan penerapannya*. Jakarta: Rajawali pers.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pitana, I. G dan Gayatri P. G, 2005. *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Yoeti, 1993. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung : Refika Aditama
- Damajati, R. S, *Istilah-istilah pariwisata, Pradnya Paramita, jakarta 1993*.
- Ndraha Talizidhuhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sarjadi, Soegeng., Rinakit, Sukardi. 2004. *Meneropong Indonesia 2020, Pemikiran dan Masalah Kebijakan*. Jakarta : SSS
- Sarundajang. 2011. *Babak Baru Sistem Pemerintahan*. Jakarta : Kata Hasta Pustaka
- Sukandarrumidi. 2002. *Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta : Gajdah Mada University Press.
- Fandeli, Chafid. 1995. *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta : Liberty.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 2014. *Selayar Taman Surgawi (Heavenly Park)*. CV.Spermonde Utama.

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Peraturan daerah kabupaten kepulauan selayar nomor 7 tahun 2011 tentang rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten kepulauan selayar.

Peraturan daerah kabupaten selayar nomor 12 tahun 2002 tentang program pembangunan daerah kabupaten kepulauan selayar.





Sumber Internet




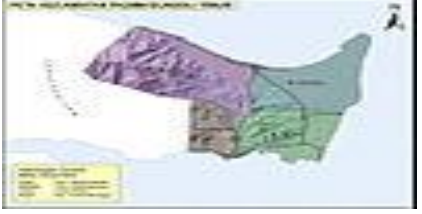
www.Selayaronline.com (1 maret 2015)




www.budpar.kepulauanselayarkab.go.id (1 maret 2015)

www.Kepulauanselayarkab.go.id. (5 Maret 2015)

Gambar 1 Peta dan Daftar kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Kecamatan	Peta	Kelurahan/Desa
1	Bontoharu		Bontobangun
			Bontolebang
			Bontosunggu
			Bontoborusu
			Putabangun
			Bontotangnga
			Kahu-kahu
			Kalepadang*)
2	Benteng		Benteng
			Benteng Selatan
			Benteng Utara
3	Bontomanai		Polebungin
			Jambuiya
			Bontomarannu
			Bonea Timur
			Mare-mare
			Barugaiya
			Parak
			Bonea Makmur
			Bontokoraang*)
			Kaburu*)
4	Buki		Buki
			Bontolempangan
			Balang Butung
			Lalang Bata
			Kohala
			Mekar Indah*)

			Buki Timur*)
5	Bontomatene		Batangmata Onto Batangmata Sapo Maharayya Barat Lambongan Bontona Saluk Kayu Bau Tanete Pamatata Bongaiya Menara Indah Tamalanrea*)
6	Bontosikuyu		Harapan Tambolongan Appa Tanah Lowa Lantibongan Binanga Sombaiya Laiyolo Laiyolo Baru Polassi Patikarya Patilereng Bahuluang*)
7	Pasimasunggu		Kembang Ragi Tanamalala Labuang Pamajang Masungke Bontosaile Maminasa Teluk Kampe*)
8	Pasimasunggu Timur		Bontobulaeng Bontomalling Bontobaru Lembang Baji Bontojati*) Ujung*)

9	Taka Bonerate		Batang
			Kayuadi
			Tarupa
			Nyiur Indah
			Jinato
			Rajuni
			Latondu
			Tambuna
			Pasi Tallu*)
10	Pasimarannu		Bonerate
			Bonea
			Batu Bingkung
			Komba-komba
			Lambego
			Majapahit
			Sambali*)
11	Pasilambena		Kalaotoa
			Garaupa
			Karumpa
			Lembang Matene
			Pulo Madu
			Lamantu*)
			Garaupa Raya*)

*) masih bergabung dengan desa induk

(Sumber : Kepulauan Selayar Dalam Angka 2012)

Dokumentasi



Gambar 1 : Kepala Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar



Gambar 2 : Anggota DPR komisi C



Gambar 3 : Wawancara dengan penjaga Gong Nekara



Gambar 4 : Wawancara dengan penjaga tiket Pantai Pa'baddilang

Pantai Pa'baddilang (Wisata Bahari)





Gua Tajuiya (Wisata Alam)



Gong Nekara



